



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR
KESEHATAN, PENGELUARAN PEMERINTAH
SEKTOR PENDIDIKAN DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA
JAWA TIMUR 2006-2013**

SKRIPSI

Oleh:

**Mochammad Yuli Arifin
NIM 110810101143**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR
KESEHATAN, PENGELUARAN PEMERINTAH
SEKTOR PENDIDIKAN DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA
JAWA TIMUR 2006-2013**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Mochammad Yuli Arifin
NIM 110810101143**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sumarni dan Ayahanda Achmad Suhadak tercinta yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

“Bacalah dengan menyebut nama tuhanmu.”

(QS. Al-Alaq, 96: 1)

“Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan.”

(QS. Ar-Rahman, 55: 13)

“Allah tidak mewajibkan orang-orang yang bodoh untuk menuntut ilmu kecuali terlebih dahulu mewajibkan orang-orang yang berilmu untuk mengajar.”

(Umar bin Khattab)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochammad Yuli Arifin

NIM : 110810101143

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Juli 2015
Yang menyatakan,

Mochammad Yuli Arifin
NIM 110810101143

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR
KESEHATAN, PENGELUARAN PEMERINTAH
SEKTOR PENDIDIKAN DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA
JAWA TIMUR 2006-2013**

Oleh:

Mochammad Yuli Arifin
NIM 110810101143

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Petrus Edi Suswandi, M.P
Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Moh. Adenan, M.M

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan,
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan
Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan
Manusia Jawa Timur 2006-2013

Nama Mahasiswa : Mochammad Yuli Arifin

NIM : 110810101143

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia (ESDM)

Tanggal Persetujuan : Kamis, 2 Juli 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Petrus Edi Suswandi, M.P
NIP. 195504251985031001

Dr. Moh. Adenan, M.M
NIP. 196610311992031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN
PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
JAWA TIMUR 2006-2013**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mochammad Yuli Arifin

NIM : 110810101143

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

... ..

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E, M.Si ()
NIP. 196306141990021001

Sekretaris : Dra. Anifatul Hanim, M.Si ()
NIP. 196507301991032001

Anggota : Dra. Andjar Widjajanti, M.P ()
NIP. 195206161977022001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E, M.Si
NIP. 196306141990021001

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013

Oleh: Mochammad Yuli Arifin

Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember

ABSTRAK

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara, dimana pembangunan suatu negara belum bisa dikatakan berhasil apabila dilihat hanya dari besarnya pendapatan domestik bruto tanpa adanya upaya peningkatan pembangunan manusianya. Indeks pembangunan manusia merupakan suatu indeks yang digunakan dalam mengukur capaian pembangunan manusia. Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terdiri 38 Kabupaten/Kota. Banyaknya jumlah Kabupaten/Kota dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur ini dapat memberikan gambaran pembangunan manusia yang bervariasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Model analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan analisis data panel menggunakan pendekatan *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013 sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Influence of Government Expenditure of Health Sector, Government Expenditure of Educational Sector and Economic Growth toward Human Development Index Jawa Timur 2006-2013

By: Mochammad Yuli Arifin

Department of Development Economics, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

Human development is one indicators of the progress of a country, where the development of a country can not be considered successful if seen only from the size of gross domestic product in the absence of efforts to improve human development. Human development index is an index used to measure the achievement of human development. East Java is one of the provinces in Indonesia which comprised 38 Regency/City. A large number of Regency/City and population in East Java can provide a varied picture of human development. The purpose of this research was to determine the influence of government expenditure of health sector, government expenditure of educational sector and economic growth toward human development index East Java in 2006-2013. Model analysis of the data used to determine the relationship between variables used panel data analysis using a fixed effect approach. The results showed that, government expenditure of health sector and government expenditure of educational sector and significant positive effect on the human development index East Java 2006-2013, while economic growth positive effect and not significant on the human development index East Java 2006-2013.

Keywords: *Human Development Index, Government Expenditure of Health Sector, Government Expenditure of Educational Sector and Economic Growth*

RINGKASAN

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013; Mochammad Yuli Arifin; 110810101143; 2015; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara, dimana pembangunan suatu negara belum bisa dikatakan berhasil apabila dilihat hanya dari besarnya pendapatan domestik bruto tanpa adanya upaya peningkatan pembangunan manusianya. Banyak cara yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia suatu negara, salah satunya adalah mengukur keberhasilan pembangunan manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sebanyak 37.476.757. Banyaknya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur ini dapat memberikan gambaran pembangunan manusia yang bervariasi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Model analisis data yang digunakan adalah regresi data panel menggunakan pendekatan *fixed effect*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory* dengan menggunakan data sekunder. Cakupan penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu 38 Kabupaten/Kota, dengan series data 8 tahun dari tahun 2006-2013 dengan jumlah keseluruhan 304 sampel. Sumber data diperoleh berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Hasil estimasi menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur 2006-2013.

PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, tenaga, pikiran, materi dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Petrus Edi Suswandi, M.P selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Moh. Adenan, M.M selaku Dosen Pembimbing Anggota yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi M.Si, Ibu Dra. Anifatul Hanim M.Si dan Dra. Andjar Widjajanti M.P selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan-masukan dalam pengerjaan skripsi.
5. Ibu Dr. Regina Niken Wilantari, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi banyak nasihat dan saran;

6. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi, Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pelajaran selama perkuliahan;
7. Semua pihak yang turut berperan serta dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna didunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 2 Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Pembangunan Manusia	5
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	12
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	15
2.1.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	17

2.1.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	19
2.1.6 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	21
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Konseptual.....	30
2.4 Hipotesis.....	31
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Rancangan Penelitian.....	33
3.1.1 Jenis Penelitian.....	33
3.1.2 Unit Analisis.....	33
3.1.3 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.3 Metode Analisis Data.....	34
3.3.1 Analisis Regresi Data Panel.....	34
3.3.2 Uji Kesesuaian Model.....	36
3.3.3 Uji Statistik.....	36
3.3.4 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya.....	43
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum.....	45
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur.....	45
4.1.2 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur.....	46
4.1.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.....	48
4.1.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.....	49
4.1.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	51
4.2 Analisis Data.....	53
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	53
4.2.2 Analisis Regresi Data Panel.....	54
4.2.3 Uji Kesesuaian Model.....	55
4.2.4 Hasil Analisis Data Panel dengan <i>Fixed Effect</i>	55

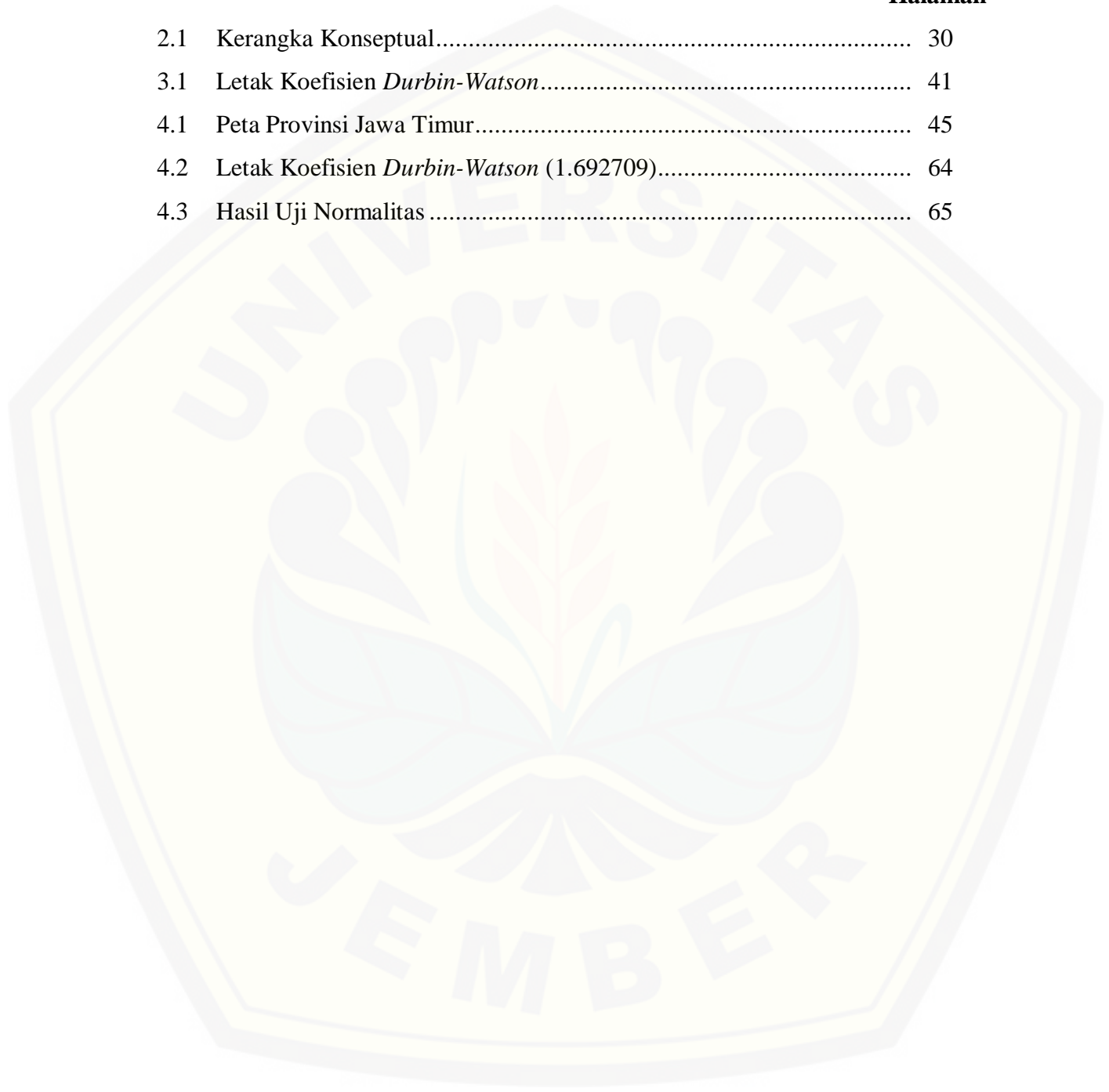
4.2.5 Uji Statistik.....	59
4.2.6 Uji Asumsi Klasik.....	62
4.3 Pembahasan	66
4.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehata terhadap Indeks Pembangunan Manusia	66
4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	68
4.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia	69
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Perhitungan Komponen	
Indeks Pembangunan Manusia	6
2.2 Penelitian Terdahulu	28
3.1 Kriteria Pengujian <i>Durbin-Watson</i>	42
4.1 Administrasi Jawa Timur	46
4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia	
Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013.....	47
4.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Kabupaten/Kota	
Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013 (Miliar Rupiah)	48
4.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Kabupaten/Kota	
Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013 (Miliar Rupiah)	50
4.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	
Atas Dasar Harga Konstan PDRB Tahun Dasar 2000.....	51
4.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000	
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013.....	52
4.7 Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect</i> dan <i>Random Effect</i>	54
4.8 Hasil Uji Hausman.....	55
4.9 Hasil Regresi Data Panel dengan Pendekatan <i>Fixed Effect</i>	56
4.10 Nilai (Uji t) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor	
Kesehatan, Penngeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan	
Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan	
Manusia di Provinsi Jawa Timur	61
4.11 Uji Multikolinearitas Korelasi Sederhana.....	62
4.12 Uji Heteroskedastisitas.....	63
4.13 Kriteria Pengujian <i>Durbin-Watson</i>	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	30
3.1 Letak Koefisien <i>Durbin-Watson</i>	41
4.1 Peta Provinsi Jawa Timur.....	45
4.2 Letak Koefisien <i>Durbin-Watson</i> (1.692709).....	64
4.3 Hasil Uji Normalitas	65



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (PPS) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2013.....	79
B Uji Regresi Data Panel menggunakan Pendekatan <i>Fixed Effects</i>	87
C Uji Regresi Data Panel menggunakan Pendekatan <i>Random Effects</i>	89
D Uji Kesesuaian Model menggunakan Uji Hausman.....	90
E Uji Multikolinearitas menggunakan Uji <i>Correlation</i> dan Uji <i>Auxiliary Regression</i>	91
F Uji Heteroskedastisitas menggunakan <i>Cross Section Weight</i>	91
G Uji Autokorelasi dengan <i>Durbin-Watson</i>	92
H Uji Normalitas menggunakan <i>Histogram</i>	93

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selain kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Indonesia, Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi faktor penentu pembangunan. Manusia menjadi sentral dalam kelancaran pembangunan setiap negara karena manusia merupakan makhluk yang dikaruniai akal dan pikiran yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas, akan membantu kelancaran dalam pembangunan perekonomian negara menuju kesejahteraan.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara, dimana pembangunan suatu negara belum bisa dikatakan berhasil apabila dilihat hanya dari besarnya pendapatan domestik bruto tanpa adanya upaya peningkatan pembangunan manusianya. Banyak cara yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia suatu negara, salah satunya adalah mengukur keberhasilan pembangunan manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indeks pembangunan manusia merupakan suatu indeks yang digunakan dalam mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Selanjutnya, ukuran capaian pembangunan manusia yang telah terpenuhi dan memiliki banyak sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu pembangunan perekonomian suatu negara untuk menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk mensejahterakan masyarakat beserta meningkatkan taraf hidupnya yang diukur dengan tinggi-rendahnya pendapatan perkapita. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Pembangunan ekonomi memiliki dua tujuan, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Pembangunan ekonomi jangka panjang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil yang merata secara material dan spiritual berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan ekonomi jangka pendek bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan dan taraf hidup masyarakat. Selain peningkatan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan merupakan kondisi dimana terpenuhinya semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota atau 38 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sebanyak 37.476.757 jiwa pada waktu dilakukan sensus penduduk tahun 2010. Banyaknya jumlah Kabupaten/Kota dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur ini dapat memberikan gambaran pembangunan manusia yang bervariasi. Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah dengan kualitas yang baik, pemerintah daerah menggunakan anggaran belanja yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai di sektor-sektor yang ingin dibangun untuk menjadi lebih baik. Jelasnya lagi, pemerintah harus bisa dalam mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia misalnya realisasi belanja daerah untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Selain dari sisi anggaran, kondisi perekonomian suatu daerah juga dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Perekonomian yang baik dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, mengingat pentingnya indeks pembangunan manusia bagi pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel terikat (variabel dependen) dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas (variabel independen).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian singkat latar belakang diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan, dalam penelitian ini juga terdapat beberapa manfaat baik itu manfaat yang akan didapat oleh pembaca ataupun manfaat secara ilmiah, antara lain:

1. Bagi pemerintah, dapat dipergunakan sebagai pengambilan kebijakan tentang indeks pembangunan manusia.
2. Manfaat ilmiah, untuk memahami dan mendalami permasalahan di bidang ilmu ekonomi khususnya permasalahan indeks pembangunan manusia.
3. Manfaat akademis, dapat menjadi informasi, wacana dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian mengenai obyek yang sama.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Manusia

Investasi sumber daya manusia akan membentuk modal manusia (*human capital*) yang akan memberikan imbalan berupa penghasilan yang lebih besar di masa mendatang. Sama halnya dengan investasi di bidang usaha tersebut, maka investasi dilakukan juga di bidang sumber daya manusia yang dikorbankan adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi yang diperoleh sebagai imbalannya adalah tingkat penghasilan lebih tinggi untuk mampu mencapai kenaikan pada pengeluaran. Investasi yang demikian dinamakan *human capital*. Penerapannya dapat dilakukan dalam hal (1) pendidikan dan latihan, (2) migrasi, dan (3) perbaikan gizi dan kesehatan (Simanjutak dalam Saputri, 2014: 21).

Keberhasilan pembangunan suatu daerah khususnya pembangunan manusia atau masyarakatnya dapat dinilai dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan tersebut diantaranya mengenai pengangguran, kemiskinan dan inflasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal yang selanjutnya muncul pertanyaan mengenai penilaian keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2008: 9), indeks pembangunan manusia atau yang biasa disebut dengan IPM merupakan ukuran kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia dibangun atas 3 (tiga) dimensi dasar, antara lain; (1) dimensi kesehatan, (2) dimensi pengetahuan dan (3) dimensi hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang luas karena terkait dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya, dalam mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator antara angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*purchasing power of*

parity). Indeks pembangunan manusia dapat mengetahui kondisi pembangunan di suatu daerah dengan alasan; *pertama*, indeks pembangunan manusia menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia. *Kedua*, indeks pembangunan manusia menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. *Ketiga*, indeks pembangunan manusia digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat. *Keempat*, meskipun dapat menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, tetapi indeks pembangunan manusia belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya, namun untuk saat ini merupakan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia.

Sebelum dilakukan penghitungan indeks pembangunan manusia, setiap komponen dalam indeks pembangunan manusia harus dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan formula sebagai berikut (BPS, 2008: 12):

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\text{min})})}{(X_{(i-\text{maks})} - X_{(i-\text{min})})}$$

Keterangan:

$X_{(i,j)}$ = Indeks komponen ke- i dari daerah j

$X_{(i-\text{min})}$ = Nilai minimum dari X_i

$X_{(i-\text{maks})}$ = Nilai maksimum dari X_i

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Perhitungan Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Komponen IPM	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
Angka Harapan Hidup	25	85
Angka Melek Huruf	0	100
Rata-rata Lama Sekolah	0	15
Kemampuan Daya Beli (PPP)	300.000 (1996) 360.000 ^{b)} (1999, 2002)	732.720 ^{a)}

Sumber: BPS (2008: 13)

Keterangan:

- a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018
- b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Pengukuran indeks pembangunan manusia berdasarkan pada tiga indeks, antara lain; indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pendapatan serta dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Harapan Hidup

Pada indeks harapan hidup terdapat komponen indeks pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup. Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan merupakan dasar produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Sedangkan pada tingkat makro, penduduk dengan kesehatan yang baik merupakan masukan penting untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi jangka panjang (Faturrohmin, 2011: 30-31).

Angka harapan hidup merupakan rata-rata dari perkiraan seberapa banyak tahun yang dapat ditempuh oleh individu. Pendekatan tak langsung (*indirect estimation*) biasa digunakan dalam penghitungan angka harapan hidup. Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penghitungan angka harapan hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Program *morrtpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data angka lahir hidup dan angka masih hidup. Selanjutnya dipilih metode *Russel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia serta negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston dalam BPS, 2008: 9-10).

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen dalam angka harapan hidup merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun (BPS, 2008: 10).

Keberhasilan pembangunan adalah cita-cita suatu bangsa yang terlihat dari peningkatan taraf hidup dan Umur Harapan Hidup (UHH)/Angka Harapan Hidup (AHH). Namun peningkatan UHH ini dapat mengakibatkan terjadinya transisi epidemiologi dalam bidang kesehatan akibat meningkatnya jumlah angka kesakitan karena penyakit degeneratif. Perubahan struktur demografi ini diakibatkan oleh peningkatan populasi lanjut usia (lansia) dengan menurunnya angka kematian serta penurunan jumlah kelahiran. Keberhasilan pembangunan adalah cita-cita suatu bangsa yang terlihat dari peningkatan taraf hidup dan Umur Harapan Hidup (UHH)/Angka Harapan Hidup (AHH). Namun peningkatan umur harapan hidup ini dapat mengakibatkan terjadinya transisi epidemiologi dalam bidang kesehatan akibat meningkatnya jumlah angka kesakitan karena penyakit degeneratif. Perubahan struktur demografi ini diakibatkan oleh peningkatan populasi lanjut usia (lansia) dengan menurunnya angka kematian serta penurunan jumlah kelahiran (Faturrohmin, 2011: 31-32).

2. Indeks Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean yers schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabungkan setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga.

Dalam penghitungan indeks pendidikan, ada 2 (dua) batasan yang dipakai sesuai dengan kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minimum adalah 0 (nol). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 (nol) tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat

pendidikan maksimum setara dengan lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) (BPS, 2008: 10-11).

a) Angka Melek Huruf

Pada umumnya, buta huruf atau buta aksara adalah ketidakmampuan seseorang dalam konteks membaca dan menulis. Ketidakmampuan ini dapat menempatkan individu atau kelompok dalam ketertinggalan dari individu atau kelompok lainnya. Karena, membaca dan menulis merupakan jendela untuk melihat dunia, dimana dengan kemampuan membaca dan menulishlah seseorang bisa melihat dunia dengan segala perkembangannya. Angka melek huruf merupakan salah satu parameter yang paling mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Human development index atau indeks pembangunan manusia dapat dijadikan ukuran dalam menentukan tingkat kesejahteraan sekaligus juga dapat menentukan tingkat umur harapan hidup (*life expectancy*). Jadi, apabila penduduk makin melek huruf, dapat dikatakan makin maju masyarakat itu dalam ke depannya.

Angka melek huruf juga dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan (BPS, 2011:88).

Adapun cara yang digunakan pemerintah dalam pemberantasan angka melek huruf ini dengan cara mendidik penduduk buta huruf dengan prioritas usia 10-44 tahun, agar dapat membaca huruf dan angka latin serta Bahasa Indonesia sederhana yang dapat dijadikan bekal dalam pergaulan sehari-hari, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi bagi yang memenuhi syarat.

b) Rata-Rata Lama Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap

warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan ayat (4) menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah minimal 0 (nol) tahun dan maksimal 15 tahun.

Dengan demikian, jelaslah bahwa negara kita menempatkan pendidikan pada prioritas pertama dengan mengalokasikan anggaran terbesar dari semua sektor. Pendidikan merupakan sektor yang memang perlu diprioritaskan negara karena menyentuh langsung hak masyarakat, dan sangat terkait erat dengan pembangunan sumber daya manusia untuk masa depan. Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan.

3. Indeks Pendapatan

Komponen indeks pembangunan manusia dalam indeks pendapatan adalah pengeluaran per kapita riil. Menurut BPS (2013: 28) Pengeluaran per kapita riil merupakan penggambaran dari kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang ataupun jasa. Kemampuan daya beli ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian, kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lainnya memiliki perbedaan.

Dasar penghitungan PPP yang digunakan UNDP adalah Produk Nasional Bruto (PNB). Karena produk nasional bruto tidak dapat dibandingkan secara langsung maka dibentuk proyek yang berskala internasional (*International Comparison Project/ ICP*) dengan tujuan “menyesuaikan” angka produk nasional bruto riil, sehingga dapat dibandingkan. Untuk maksud ini ditentukan sejumlah komoditi sebagai paket untuk dasar perbandingan secara internasional. Angka yang dihasilkan, untuk mencerminkan daya manfaat yang standar, kemudian “disesuaikan” lagi dengan formula Atkinson. Penyesuaian dengan Formula Atkinson pada dasarnya menggunakan prinsip diminishing marginal utility.

Prosedur menghitung pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula atkinson (BPS, 2008: 11):

$$\begin{aligned}
 C(I) &= C_{(i)}, && \text{Jika } C_{(i)} < Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2} + 3(C_{(i)} - Z)^{1/3}, && \text{Jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2} + 3(Z)^{1/3} + 2(C_{(i)} - Z)^{1/4}, && \text{Jika } 3Z < C_{(i)} < 4z
 \end{aligned}$$

Keterangan:

$C_{(i)}$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp.

549.500 per kapita per tahun atau Rp. 1.500 per kapita per hari

2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Teori W.W Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto dalam Winarti, 2014: 32) menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, antara lain; tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya. Menurut Musgrave, proses pembangunan merupakan rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan (Mangkoesoebroto dalam Winarti, 2014: 32)

Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara, tetapi tidak didasarkan pada suatu teori tertentu.

2. Teori Wagner

Teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap *Gross National Product* (GNP). Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah ikut meningkat. Terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum,

pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesobroto dalam Winarti, 2014: 31).

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Peacock dan Wiseman menyatakan sebagai berikut: masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Mangkoesobroto dalam Winarti, 2014: 31).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno dalam Pratowo) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah/regional.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan utang pemerintah serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan atas pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek (Patta, 2012: 32).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013: iii) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) termuat prioritas-prioritas pembangunan, terutama prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai melalui pelaksanaan belanja daerah sesuai sumber daya yang tersedia baik yang didapatkan melalui skema transfer maupun perpajakan daerah dan retribusi daerah. Penetapan prioritas-prioritas tersebut beserta upaya pencapaiannya merupakan konsekuensi dari meningkatnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, daerah bertanggungjawab sepenuhnya agar pengelolaan sumber daya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas belanja daerah (*quality of spending*), dengan memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat. Granger Causality dalam Yuniarto (Nurcahyono: 2014, 54) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara PDRB dengan total pengeluaran pemerintah daerah.

Menurut Suparmoko yang dikutip oleh Desi dalam (Patta, 2012: 31) bahwa pengeluaran pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Sedangkan macam-macam pengeluaran pemerintah, yaitu :

1. Pengeluaran yang self liquidating sebagian atau sepenuhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa dan barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan

sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pertanian, pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

3. Pengeluaran yang tidak termasuk self liquidating dan reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monument dan sebagainya.
4. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku digunakan untuk menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara konseptual menggunakan 3 (tiga) pendekatan, antara lain (BI):

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

2. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi).

Menurut Anwar (1992: 163) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah tanpa memilik atas faktor produksi. Menurut Muchtolifah (2010: 3) Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi dimana dari total naikturunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diketahui pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan pendapatan per kapita suatu daerah.

2.1.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan merupakan dasar dari produktivitas kerja dan kapasitas belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih bersemangat dan lebih produktif dalam menjalankan pekerjaannya. Keadaan seperti ini sering terjadi pada negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih melakukan pekerjaannya secara manual. Di Indonesia contohnya, tenaga kerja laki-laki yang menderita anemia menyebabkan 20% kurang produktif jika dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki yang tidak menderita anemia. Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar lebih baik dan akan tumbuh menjadi dewasa dan lebih terdidik. Dalam keluarga yang sehat, pendidikan anak cenderung tidak terputus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat (Juanita dalam Wahid, 2012). Sedangkan pada tingkat makro, penduduk dengan kesehatan yang baik merupakan salah satu input penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi jangka panjang (Juanita dalam Wahid, 2012).

Becker dalam Saputri (2014: 25) menyatakan bahwa salah satu cara untuk berinvestasi dalam *human capital* adalah dengan meningkatkan kesehatan emosional dan fisik. Di negara-negara Barat, pendapatan lebih dipengaruhi oleh pengetahuan daripada kekuatan saat ini, namun pada masa lampau dan sampai sekarang, kekuatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan apalagi kesehatan emosional dipertimbangkan sebagai faktor penting dalam menentukan pendapatan di seluruh dunia.

Semakin banyak pemerintah mengeluarkan dana pada sektor kesehatan, maka kemungkinan besar masyarakat akan hidup sehat. Dalam indeks pembangunan manusia juga terdapat indeks kesehatan yang didalamnya terdapat

angka harapan hidup, dimana orang yang memiliki kesehatan yang baik akan memiliki umur panjang yang kemungkinan besar juga dapat mempengaruhi kualitas hidupnya.

Permasalahan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Setiawan dalam Suparno, 2015: 5). Samoelson dan Nordhaus (1994: 554), pemberantasan penyakit serta perbaikan kesehatan dan gizi, keduanya itu untuk membuat orang lebih bahagia dan menjadikan mereka pekerja produktif. Karena itu jangan menganggap klinik-klinik kesehatan dan proyek saluran air kotor sebagai suatu kemewahan, hal itu merupakan modal sosial yang sangat berguna. Meier, et al (Winarti, 2014: 41), suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan.

Dengan demikian kesehatan turut serta membantu peningkatan pembangunan manusia, karena manusia yang sehat akan jauh lebih baik daripada manusia yang kurang sehat. Kesehatan yang baik akan berpengaruh pada perubahan yang baik, sebaliknya kesehatan yang buruk atau kurang baik akan berakibat pada perubahan ke arah yang kurang baik juga tentunya. Karena Tanpa kesehatan masyarakat tidak akan memiliki semangat serta produktivitas.

2.1.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan pembangunan sektor lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan. Negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat inovasi yang lebih rendah, rendahnya tingkat efisiensi produksi, dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi (World Bank dalam Winarti, 2014: 11).

Isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan memberikan dua faktor yaitu; pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia (Khusaini dalam Syam, 2014: 21). Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah (Bastias dalam Syam, 2014: 21).

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendidikan merupakan tujuan pembangunan. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital-sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Perspektif ekonomi, pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang akan memberi keuntungan dimasa mendatang, baik kepada masyarakat atau negara, maupun orang-orang yang mengikuti pendidikan itu sendiri. Sebagai salah satu bentuk investasi sumber daya manusia, investasi pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *private investment* dan *public investment* (Todaro dan Winarti, 2014: 18). *Private investment* merupakan investasi pendidikan pada level mikro atau tingkat individu. Bentuk dari *private investment* adalah individu yang mengenyam bangku pendidikan formal maupun nonformal termasuk orangtua yang mengajarkan anak pelajaran. Sedangkan *public investment* merupakan investasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam bentuk penyediaan gedung sekolah, lembaga pendidikan, guru, dana pendidikan, penyediaan infrastruktur pendidikan, dan lain sebagainya.

Hasibuan (1996: 31) Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia dengan daya serap teknologi yang belum begitu memadai sejalan dengan rendahnya investasi di sektor pendidikan. Secara keseluruhan total investasi pada sektor pendidikan sebagai bagian dari GNP termasuk yang terendah di ASEAN, dimana pada tahun 1987 persentase ini adalah 3,3%. Malaysia pada saat yang samamembelanjakan 6,8% dari GNP untuk pendidikan, sedangkan Singapura 3,8%. Demikian pula halnya dengan bagian pengeluaran pemerintah pusat, dari seluruh pengeluaran sektor pendidikan termasuk dalam kategori terendah yaitu 2,95% dari GNP sedangkan di ASEAN rata-rata pengeluaran adalah 4,2%. Investasi di bidang fisik cukup besar dimana tahun 1987 berjumlah 26,33% dari GNP dan ini yang tertinggi di ASEAN. Dapat disimpulkan bahwa terbuka kemungkinan yang besar bagi peningkatan efisiensi,

khususnya efisiensi masyarakat dengan cara meningkatkan investasi di sektor pendidikan, sehingga terdapat keseimbangan yang lebih serasi antara investasi bagi sumber daya manusia dan investasi bagi modal fisik. Samoelson dan Nordhaus (1994: 554) Perbaikan mutu pendidikan, orang yang terdidik akan menjadi pekerja yang lebih produktif, karena itu negara harus menginvestasikan dana dalam sekolah dan program pendidikan lainnya untuk mengurangi buta huruf. Selain membaca dan menulis, orang harus dilatih dalam teknik baru di bidang pertanian dan industri . kirimkan mereka yang pintar ke luar negeri agar dapat membawa pulang pengetahuan tentang perekayasaan (*engineering*) dan perdagangan, tetapi hati-hati dengan kemungkinan terlalu banyaknya orang pintar yang lari ke Utara karena kemakmurannya.

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, et al dalam Winarti, 2014: 41).

2.1.6 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan manusia, antara lain (Syam, 2014: 7):

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Dalam teori pertumbuhan klasik terdapat kekurangan penduduk dan produksi marjinal lebih tinggi daripada pendapatan per kapita maka, penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Tetapi, apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi marjinal mengalami penurunan yang nantinya

akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan terjadi pada pendapatan nasional dan pendapatan per kapita.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Solow merupakan salah satu tokoh neo klasik yang mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi. Beberapa asumsi penting dalam memahami model Solow:

1. Tingkat teknologi dianggap konstan.
2. Tingkat depresiasi dianggap konstan.
3. Tidak ada perdagangan luar negeri aliran masuk barang.
4. Tidak ada sektor pemerintah.
5. Tingkat pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) dianggap konstan.

3. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori yang dikembangkan oleh Roemr merupakan perkembangan mutakhir teori pertumbuhan klasik-neo klasik. Roemr menyebutkan bahwa teknologi bersifat endogen. Hal ini karena teknologi dianggap sebagai faktor produksi tetap sehingga mengakibatkan terjadinya *The Law of Deminishing Return*. Dalam jangka panjang yang lebih serius dari memperlakukan teknologi sebagai faktor eksogen dan konstan adalah perekonomian yang lebih dulu maju akan terkejar oleh perekonomian yang lebih terbelakang dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat tabungan dan akses terhadap teknologi sama.

Teknologi merupakan barang publik artinya teknologi dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat walaupun bukan si penemu teknologi tersebut dan tanpa mengeluarkan biaya riset atau penelitian, sehingga dalam hal ini teknologi disebut sebagai faktor endogen.

4. Teori Schumpeter

Schumpeter menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan *entrepreneurship*. Schumpeter berpendapat bahwa kalangan pengusaha memiliki kemampuan dan keberanian dalam menciptakan dan

mengaplikasikan inovasi-inovasi baru baik dalam masalah produksi, penyusunan teknik tahap produksi maupun sistem manajemennya.

Schumpeter berpandangan kemajuan perekonomian disebabkan diberikannya kebebasan untuk para *entrepreneur*. Kebebasan yang diberikan kepada *entrepreneur* nantinya akan menimbulkan monopoli pasar dan akan memunculkan masalah non ekonomi, sehingga dapat menghancurkan sistem kapitalis.

5. Teori W.W Rostow

Menurut W.W Rostow, pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi modern merupakan suatu proses yang berdimensi banyak. Analisis Rostow ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental bukan saja dalam corak kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara. Dalam bukunya “*The Stage of Economic*” (1960), Rostow mengungkapkan tahap-tahap dalam proses pembangunan ekonomi yang dialami oleh setiap negara pada umumnya ke dalam lima tahap antara lain; tahap masyarakat tradisional, tahap pelepasan dasar untuk tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap gerak menuju kematangan dan tahap era konsumsi tinggi.

6. Teori Bauer

Profesor Bauer menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bakat, kemampuan, kualitas, kapasitas dan kecakapan, sikap, adat istiadat, nilai, tujuan dan motivasi, serta struktur politik dan kelembagaan. Profesor Bauer membagi pertumbuhan ekonomi menjadi dua faktor yaitu ekonomi dan non ekonomi.

1. Faktor Ekonomi

- a) Sumber alam atau tanah merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian. Tersedianya sumber alam yang melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak dapat membangun dengan cepat.

- b) Akumulasi modal, faktor ekonomi penting kedua dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Modal berarti penyediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal.
- c) Organisasi, salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan karena organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi komponen modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil risiko diantara ketidakpastian. Wiraswasta bukanlah manusia dengan kemampuan biasa melainkan wiraswastawan memiliki kemampuan khusus dibandingkan dengan manusia lainnya. Menurut Schumpeter, seorang wiraswasta tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).
- d) Kemajuan teknologi, perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan didalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan pada produktivitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain.

2. Faktor Non Ekonomi

- a) Sosial, sosial dan budaya dianggap mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena pendidikan dan kebudayaan Barat membawa ke arah penalaran dan skeptisisme. Ia menanamkan semangat kembara yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru.
- b) Manusia, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata menekan pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekan pada efisiensi mereka. Menurut Kuznet, penduduk Eropa meningkat 433% antara 1750-1950 sedang penduduk dunia selebihnya meningkat 200% dalam periode itu. Walaupun penduduk meningkat lima kali lipat, *Gross National Product*

(GNP) per kapita negara-negara Eropa dan negara kaya baru itu naik sebanyak sepuluh kali lipat. Peningkatan GNP per kapita yang begitu hebat rupanya berkaitan erat dengan faktor manusia sebagaimana terlihat dalam efisiensi atau produktivitas yang melonjak di kalangan tenaga buruh. Inilah yang oleh para ahli ekonomi modern disebut pembentukan modal insani, yaitu “proses peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan.” Proses ini mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial pada umumnya. Penggunaan secara tepat sumber daya manusia untuk pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan cara berikut. *Pertama*, adanya pengendalian atas perkembangan penduduk. Sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan baik apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan dan diturunkan. *Kedua*, adanya perubahan dalam pandangan tenaga buruh. Perilaku sosial dari tenaga buruh merupakan hal yang penting di dalam proses pembangunan ekonomi. Jadi, persyaratan yang paling penting dari laju pertumbuhan ialah manusia. Manusia yang bersedia menyambut baik tantangan perubahan ekonomi dan menerima kesempatan yang ada di dalamnya. Manusia di atas segalanya, yang berdedikasi terhadap pembangunan ekonomi negerinya, kejujuran, kewibawaan, pengetahuan dan prestasi kerja.

- c) Politik dan administratif membantu dalam pertumbuhan ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Jepang dan Perancis merupakan hasil dari stabilitas politik dan administrasi mereka yang kokoh sejak abad ke-19. Kecuali Amerika Serikat, negara tersebut terlibat langsung di dalam perang dunia dan hancur berantakan namun, mereka tetap bergerak maju berdasarkan kekuatan politik dan tradisi administrasi mereka. Pada pihak lain, Italia belum berhasil tumbuh lantaran keadaan politik yang tidak stabil dan administrasi yang lemah serta korup. Profesor Lewis dengan tepat melihat “tindakan pemerintah memainkan peranan penting di dalam merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi.”

Todaro dalam Mirza (2012: 5) menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan ekonomi dari bangsa yang bersangkutan.

Todaro (2000: 137) membagi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam 3 komponen utama, antara lain:

1. *Akumulasi* modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia atau sumberdaya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk yang selanjutnya akan menambah jumlah angkatan kerja.
3. *Kemajuan* teknologi yang dalam pengertian sederhananya terjadi karena ditemukannya cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani suatu pekerjaan.

Selanjutnya, konsep modal manusia menjadi penting sejalan dengan perkembangan pemikiran, bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Dalam konsep pertumbuhan modern, faktor teknologi dalam arti luas yang dianggap konstan dan ditentukan secara eksogenus oleh aliran pemikiran pertumbuhan tradisional, dianggap kurang tepat. Faktor teknologi adalah dinamis dan ditentukan oleh sumber daya manusia atau mutu modal manusia. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja perkembangan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang penting bagi perkembangan ekonomi (Brata dalam Patta, 2012: 39).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Huban Arif “*Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat*” menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan jumlah penduduk miskin. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil yang didapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Huban Arif antara lain; (1) pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera barat, (2) pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera barat, dan (3) jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat.

Sri Fatmasari Syam pada tahun 2014 melakukan penelitian yang berjudul “*Pengaruh Pegeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan*” mengambil variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel terikat serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian Sri Fatmasari Syam adalah, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2013 Meylina Astri S, Pd. melakukan penelitian mengenai indeks pembangunan manusia dengan judul “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia*” yang menggunakan 3 (tiga) variabel penelitian didalamnya, antara lain pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendapatan dan indeks pembangunan manusia. Alat analisis yang dilakukan adalah metode statistika induktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Meylina Astri S, Pd. adalah

tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian dengan judul “*Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*” yang dilakukan oleh Muhammad Bhakti Setiawan pada tahun 2013 menggunakan 5 (lima) variabel, yaitu; (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Produk Domestik Bruto (PDB), (3) pajak pendapatan, (4) dummy desentralisasi dan (5) dummy kritis ekonomi. Alat analisis yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM) yang menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (uji ADF). Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bhakti Setiawan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan pajak pendapatan secara signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Nur Baeti pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*” dengan menggunakan 3 (tiga) variabel, antara lain: pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah khususnya sektor pendidikan dan kesehatan. Alat analisis yang dipakai adalah regresi data panel menggunakan pendekatan *fixed effect*. Hasil yang didapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Baeti antara lain; (1) pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah, (2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah dan (3) pengeluaran pemerintah khususnya sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil
1	Hubban Arif	Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat	Regresi linier berganda	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan jumlah penduduk miskin

Lanjutan Tabel 2.2...

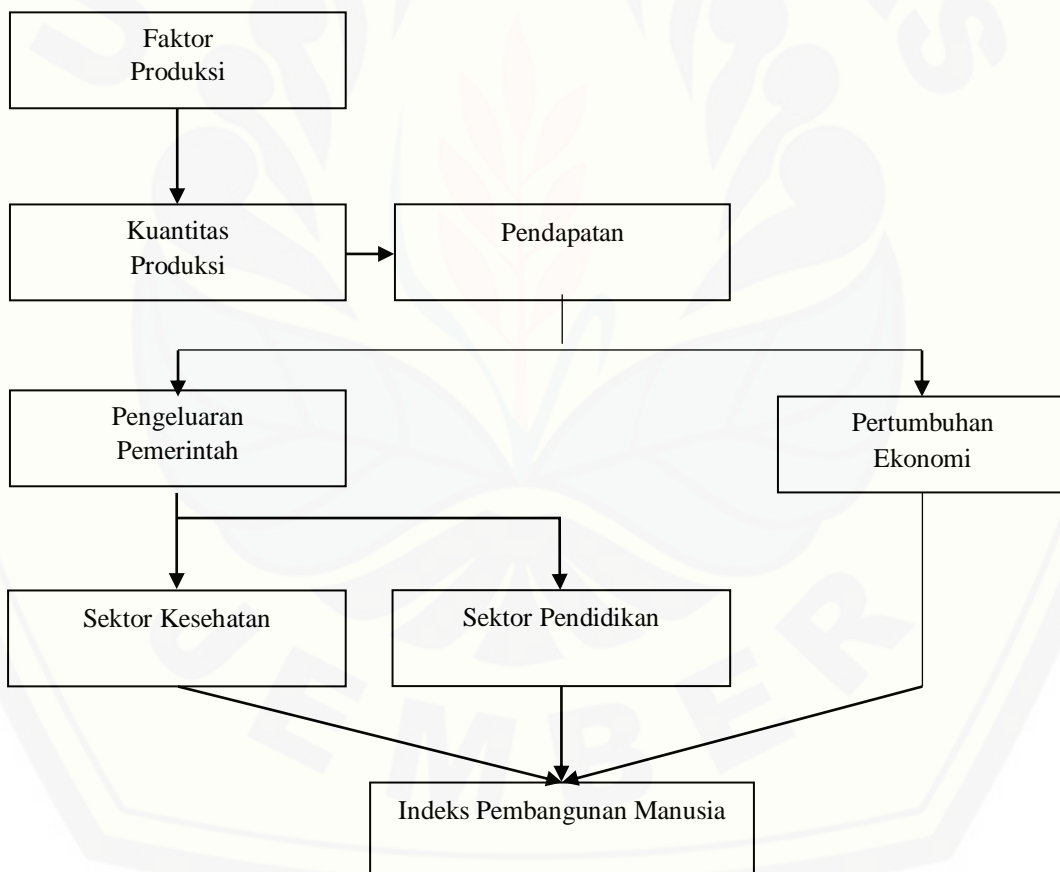
No.	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil
				berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera barat
2	Sri Fatmasari Syam 2014	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan	Regresi linier berganda	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
3	Meylina Astri S, Pd. 2013	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia	Statistika induktif/statistika inferensial	Tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
4	Muhammad Bhakti Setiawan 2013	Indeks pembangunan Manusia Indonesia	Error Correction Model (ECM) • Uji Augmented Dickey Fuller (ADF)	PDB dan pajak pendapatan secara signifikan mempengaruhi IPM
5	Nur Baeti 2013	Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011	Regresi data panel: <i>Fixed effect</i>	1. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah 2. Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan

Lanjutan Tabel 2.2...

No.	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil
				Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dan tinjauan pustaka diatas, maka dapat dimunculkan kerangka konseptual yang bertujuan untuk menunjukkan hal-hal yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, antara lain:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausahawan dapat mempengaruhi kuantitas produksi serta nantinya akan mempengaruhi pendapatan suatu negara. Pendapatan suatu negara akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas guna membangun perekonomian negara untuk dianggarkan pada pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Bselain pengeluaran pemerintah yang dipengaruhi oleh pendapatan, pertumbuhan ekonomi juga di pengaruhi oleh kenaikan pendapatan tiap tahunnya, sehingga pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan serta pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kenaikan indeks pembangunan manusia.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara pada suatu penelitian yang masih perlu diuji kebenarannya. Adanya hipotesis dalam penelitian ini memiliki fungsi, *pertama*, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang penelitian. *Kedua*, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang dapat diuji dalam penelitian. *Ketiga*, hipotesis memberikan arah dalam penelitian. *Keempat*, hipotesis memberikan kerangka untuk kesimpulan penelitian.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dapat disusun hipotesis atau dugaan sementara sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan *explanatory* yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Dalam metode penelitian *explanatory* ini menjelaskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti (Nasir, 1998: 45).

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Cakupan penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu 38 Kabupaten/Kota, dengan series data 8 tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2013 dengan jumlah keseluruhan 304 data panel yang merupakan penggabungan data *cross section* dan *time series*. Sumber data diperoleh berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dilakukan dengan cara menyalin data yang telah ada sebelumnya dengan cara mendatangi instansi terkait secara langsung ataupun secara tidak langsung (melalui internet, literatur, buku, jurnal dan lain sebagainya). Data yang diperoleh berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

3.3 Metode Analisis Data

Pada umumnya, regresi data panel berbeda dengan regresi biasanya. Dalam regresi data panel terdapat tahapan penentuan model estimasi yang harus dilalui. Tahapan tersebut, antara lain; *pertama* penentuan analisis regresi data panel terdiri dari (1) *Fixed Effect Model* (FEM) dan (2) *Random Effect Model* (REM). Setelah dilakukan analisis regresi data panel, tahap *kedua* yang harus dilakukan adalah penentuan uji kesesuaian model dengan *Hausman test* atau uji Hausman. Tahap *ketiga* yaitu melakukan uji statistik diantaranya adalah uji parsial t (uji t), uji simultan F (uji F) dan uji R^2 . Kemudian, tahap terakhir yaitu tahap *keempat* yang dilakukan dalam metode analisis data adalah uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas)

3.3.1 Analisis Regresi Data Panel

Model regresi dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) dan variabel bebas antara lain, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PPS), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPD) dan pertumbuhan ekonomi (PE). Apabila ditulis dalam suatu fungsi matematis, sebagai berikut:

$$IPM = f(PPS, KMS, PE, \varepsilon)$$

Keterangan:

- IPM = Indeks pembangunan manusia
- PPS = Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan
- PPD = Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan
- PE = Pertumbuhan ekonomi
- ε = *Error terms*

Dalam analisis model panel data dikenal dua macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan *fixed effect*, dan pendekatan efek acak *random effect*. Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis panel data, antara lain (Nurchayono, 2014: 24):

1. Fixed Effect

Asumsi yang dipakai dalam model regresi *fixed effect*, bahwa intersep adalah berbeda antar individu sedangkan slopenya tetap sama antar individu. Untuk mengestimasi model *fixed effect* adalah dengan cara menggunakan metode teknik variabel *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variabels (LSDV)*.

2. Random Effect

Dimasukkannya variabel *dummy* di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) dikenal sebagai metode *random effect*.

Pada analisis data panel ada empat pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan metode pendekatan *fixed effect* atau *random effect*, antara lain (Nurchayono, 2014: 25):

1. Apabila jumlah *time-series* (T) besar sedangkan jumlah *cross-section* (N) kecil, maka hasil *fixed effect* dan *random effect* tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu *fixed effect model (FEM)*.
2. Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (random) maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *fixed effect*.
3. Apabila komponen error (ϵ_i) individual berkorelasi maka penaksir *random effect* akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias.
4. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

3.3.2 Uji Kesesuaian Model

Pengujian dalam analisis ini menggunakan *Hausman test* atau uji Hausman untuk mengetahui kesesuaian model dari ketiga metode teknik estimasi data panel tersebut. Uji Hausman adalah pengujian statistik sebagai dasar dalam pemilihan model menggunakan *fixed effect* dan *random effect*. Statistik uji hausman mengikuti *chi square* dengan *deggre of freedom* sebanyak jumlah variabel bebas dari model. Dengan ketentuan H_0 dari uji hausman yaitu *random effect* dan H_1 dari *fixed effect*. Apabila dari hasil *Hausman test* menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Sehingga dengan demikian hipotesis nol ditolak dan model yang digunakan *fixed effect*.

3.3.3 Uji Statistik

Tujuan dilakukannya uji statistik guna dapat mengetahui besarnya masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi serta koefisien dari variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) dengan melakukan uji secara parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi berganda (R^2) (Kistanto, 2013: 21).

1. Pengujian Menggunakan Uji Parsial (Uji t)

Tujuan digunakannya model uji t dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel terikat (Y) terhadap variabel bebas (X).

$$t_{\text{hitung}} = \frac{b}{sb}$$

Keterangan:

b = Koefisien variabel bebas

Sb = Standart deviasi

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel telah ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

a) Hipotesis pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

$H_0 = b_1 = 0$, berarti variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

$H_1 = b_1 \neq 0$, berarti variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

b) Hipotesis pengeluaran pemerintah sektor pendidikan

$H_0 = b_2 = 0$, berarti variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

$H_1 = b_2 \neq 0$, berarti variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

c) Hipotesis pertumbuhan ekonomi

$H_0 = b_3 = 0$, berarti variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

$H_1 = b_3 \neq 0$, berarti variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika probabilitas t hitung $\leq \alpha$ (0.05), dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- Jika probabilitas t hitung $\geq \alpha$ (0.05), dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

2. Pengujian Menggunakan Uji Simultan (Uji F)

Tujuan dilakukannya uji F guna mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur.

Dalam penelitian ini telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 = b_1 = b_2 = b_3 = 0$, Dengan kata lain seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

$H_1 = b_1, b_2, b_3 \neq 0$, Dengan kata lain seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

Kriteria pengujian:

- a) Jika probabilitas F hitung $\leq \alpha$ (0.05), dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- b) Jika probabilitas F hitung $\geq \alpha$ (0.05), dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3. Pengujian Menggunakan Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Menurut Wardhono (2004: 51) uji kecocokan model ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin tepat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel tak bebas. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi, maka semakin lemah kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel tak bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS} = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2}$$

Keterangan:

ESS = Jumlah kuadrat dari regresi

TSS = Total jumlah kuadrat

RSS = Jumlah kuadrat residual

3.3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan sebelum melakukan analisis data. Agar tercapai suatu estimasi dalam penelitian ini menggunakan metode *Ordinal Least Square (OLS)* untuk memenuhi persyaratan seluruh asumsi klasik dinamakan estimasi *Best Linier Unbiased Estimator (BLUE)* yang merupakan postulasi dari

teorema Gauss Markov (Wardhono, 2005: 54). Dalam mengestimasi parameter regresi menggunakan uji ekonometrika multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan uji normalitas.

1. Uji Multikolinieritas

Dilakukan uji multikolinieritas karena terdapat hubungan yang erat antara beberapa variabel independen atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas dalam persamaan. Mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai R^2 , F hitung serta t hitung. Adapun indikasi-indikasi terjadinya multikolinieritas menurut (Gujarati, 2012: 251) adalah sebagai berikut:

1. Jika ditemukan R^2 yang tinggi dan nilai F statistik yang signifikan tetapi sebagian besar nilai t statistik tidak signifikan.
2. Korelasi sederhana yang relatif tinggi (0.8 atau lebih) antara satu atau lebih pasang variabel bebas. Jika koefisien korelasi kurang dari 0.8 berarti tidak terjadi multikolinieritas.

Terdapat beberapa penyebab multikolinieritas, diantaranya (Ariefianto, 2012: 52):

1. Cara mengambil data dan kecilnya ukuran sampel.
2. Pembatas pada model atau populasi yang disampel. Misalnya meregresi konsumsi listrik terhadap pendapatan dan ukuran rumah. Di sini populasi darimana sampel diperoleh memiliki karakteristik kolinearitas, dimana individu yang memiliki pendapatan tinggi umumnya memiliki rumah berukuran besar.
3. Spesifikasi model, penambahan polynominal (x^2 , x^3 dan seterusnya) berpotensi menimbulkan masalah multikolinieritas terutama jika kisaran nilai x yang dimiliki adalah kecil.

4. *Common trend*, sering terjadi pada data *time series*, banyak variabel seperti GDP, konsumsi agregat, PMA dan sebagainya bergerak searah berdasarkan waktu.

2. Uji Heteroskedastisitas

Ada beberapa metode pengujian heteroskedastisitas yang bisa digunakan diantaranya yaitu Uji Park, Uji Glesjer, melihat pola grafik regresi, dan Uji White. Untuk menguji gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Uji Park. Menurut Gujarati (2010: 480) Uji Park merupakan prosedur dua tahap, pada tahap pertama kita lakukan regresi OLS dengan mengabaikan heteroskedastisitas, kemudian didapatkan \hat{u}_i^2 . Pada tahap kedua dilakukan regresi dan $\ln \hat{u}_i^2 = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$. Kriteria pengujian menggunakan Uji Park:

1. Apabila $\beta \leq 0.05$, maka heteroskedastik terjadi pada data.
2. Apabila $\beta \geq 0.05$, maka heteroskedastik tidak terjadi pada data.

Terdapat beberapa alasan mengapa residual regresi bersifat heteroskedastisitas, diantaranya (Ariefianto, 2014: 38):

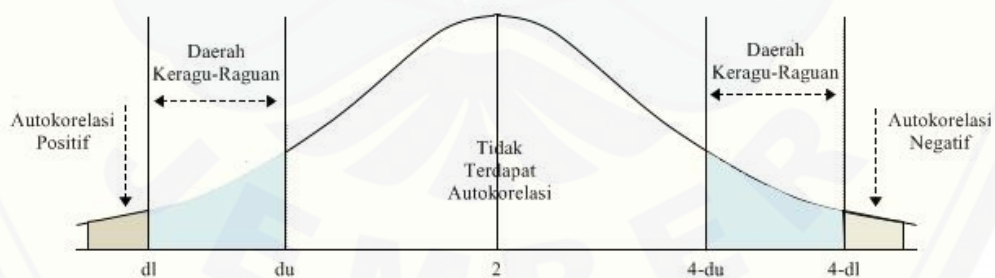
1. Situasi *error learning*, misalnya kita ingin mengetahui hubungan tingkat kesalahan mengetik terhadap berbagai variabel. Jika kita menggunakan sampel yang bersifat panel/*time series* akan sangat mungkin model yang dimiliki akan bersifat heteroskedastisitas.
2. Kemampuan diskresi, hal ini tampak jelas pada penelitian menggunakan variabel pendapatan. Aktivitas oleh individu yang memiliki pendapatan tinggi akan jauh lebih variatif dibandingkan mereka yang berpendapatan rendah. Dengan demikian suatu model regresi yang menggunakan variabel semacam ini akan mengalami peningkatan residual kuadrat dengan semakin besarnya pendapatan.

Menurut Baeti (2013: 93) pada metode pendekatan *fixed effect* estimasi dilakukan dengan pembobot (*cross section weight*) atau General Least Square (GLS). Pada mode pendekatan *random effect*, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error.

Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross section (Gujarati, 2010: 472). Menurut Suliyanto (2011) dalam Arif masalah heteroskedastisitas nampaknya menjadi lebih biasa dalam data cross section dibandingkan dengan data time series. Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi bias homoskedastisitas yaitu variasi residual sama untuk semua pengamatan. Secara ringkas walaupun terdapat heteroskedastisitas maka penaksir OLS (*Ordinary Least Square*) tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi biasa digunakan dalam penelitian menggunakan data *time series* dan juga *cross section*. Salah satu uji yang sering digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson*. Uji *Durbin-Watson* sesungguhnya dilandasi oleh model error yang mempunyai korelasi. Adapun kriteria pengujian autokorelasi dengan menggunakan *Durbin-Watson*, sebagai berikut:



Gambar 3.1 *Durbin-Watson*

Sumber: Pusattesis.com

Tabel 3.1 Kriteria Pengujian *Durbin-Watson*

Nilai d hitung	Keputusan
$0 \leq dw \leq dl$	Autokorelasi positif
$dl \leq dw \leq du$	Daerah keragu-raguan
$2 \leq dw \leq 4-du$	Tidak terdapat autokorelasi
$4-du \leq dw \leq 4-dl$	Daerah keragu-raguan
$4-dl \leq dw \leq d$	Autokorelasi negatif

Sumber: Ariefianto (2012: 30)

Rahayu (2009: 17) memberikan pendapatnya mengenai penyebab terjadinya autokorelasi, antara lain; (1) adanya variabel-variabel penjelas yang dihilangkan dari model. Seperti diketahui bahwa kebanyakan variabel-variabel ekonomi cenderung mengandung autokorelasi, dimana nilai-nilai dari periode sekarang akan tergantung pada periode sebelumnya. Jika variabel yang memiliki sifat autokorelasi dihilangkan atau dikeluarkan dari model atau dipisahkan dari sekumpulan variabel penjelas yang lain, maka akan berpengaruh yang direfleksikan dalam variabel gangguan e , sehingga nilai-nilai dari gangguan akan mengandung autokorelasi. Kejadian ini sering disebut “*quasi-autocorrelation*,” karena merupakan pola autokorelasi dari variabel penjelas (χ) yang dihilangkan muncul dalam model regresi yang digunakan sehingga tidak menunjukkan pola perilaku dari nilai-nilai e yang sesungguhnya, (2) adanya fenomena *Cobweb*, dimana nilai variabel yang digunakan sekarang bereaksi pada variabel sebelumnya dan (3) dalam analisis regresi yang melibatkan data deret waktu. Jika nilai regresi mengikutsertakan tidak hanya nilai-nilai sekarang, tetapi juga nilai-nilai pada waktu yang lalu sebagai variabel penjelas, maka variabel itu dapat disebut sebagai model distribusi “lags”.

Ariefianto (2012: 27) juga memberikan pendapatnya tentang penyebab autokorelasi, yaitu; *Inertia* salah satu karakteristik umum dari data yang bersifat time series adalah adanya *inertia (sluggishness)*. Penyesuaian akibat suatu guncangan terhadap variabel makroekonomi adalah bersifat bertahap dan berlangsung sepanjang waktu tertentu. Hal ini juga terjadi pada sekelompok variabel, dengan demikian kita dapat mengobservasi adanya pergerakan bersama, misalnya; GDP, pengangguran, dan tingkat harga yang sebenarnya disebabkan

adanya goncangan pada variabel-variabel tersebut dan mereka saat ini berada dalam penyesuaian menuju ekuilibrium. Dalam kondisi ini tentu saja model regresi yang menggunakan variabel-variabel dimaksud akan mengalami autokorelasi.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu yang memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk menguji distribusi data dalam penelitian, normal atau tidaknya data digunakan uji *Jarque-Bera* (J-B test) membandingkan antara nilai J-B (x^2 hitung) terhadap x^2 tabel (*chi-square*). Menurut Gujarati (2010: 128) ukuran sampel kecil atau pasti (sampel berukuran terhingga), misalkan data yang kurang dari 100 observasi, asumsi kenormalan merupakan sebuah peranan yang sangat penting, apabila ukuran sampel sangat besar, maka asumsi kenormalan dapat diabaikan.

Menurut Wardhono dalam Nurcahyono (2014: 30) kriteria pengujian uji *Jarque-Bera* (J-B test):

- a) Bila nilai JB hitung \geq nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas J-B hitung \leq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, *error term* adalah berdistribusi normal ditolak.
- b) Bila nilai JB hitung \leq nilai X^2 tabel nilai probabilitas J-B hitung \geq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* adalah berdistribusi normal diterima.

3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

1. Indeks pembangunan manusia (Y) memiliki pengertian sebagai tingkat kesejahteraan hidup yang diukur berdasarkan dengan standard *United Nations Development Programme* (UNDP). merupakan indeks komposit yang perhitungannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} (Y_1 + Y_2 + Y_3)$$

Keterangan:

IPM = Indeks pembangunan manusia

Y_1 = Indeks harapan hidup

Y_2 = Indeks pendidikan

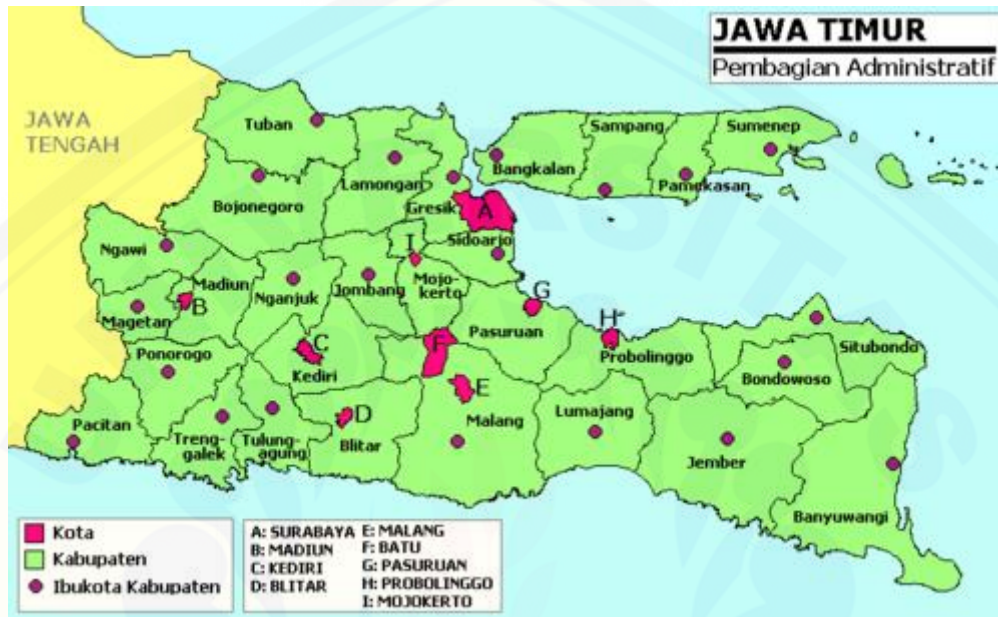
Y_3 = Indeks pendapatan

2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X1) merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan kesehatan masyarakat per tahunnya. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dalam penelitian ini diukur nominalnya tahun 2006-2013 dalam Miliar rupiah per tahun (Miliar rupiah).
3. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2) merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pendidikan masyarakat per tahunnya. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam penelitian ini diukur nominalnya tahun 2006-2013 dalam miliar rupiah per tahun (Miliar rupiah).
4. Pertumbuhan ekonomi (X3) merupakan perhitungan dari laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan tahun dasar 2000. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi diukur pada tahun 2006-2013 dalam persentase (%) dari laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan tahun dasar 2000.

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur



Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Timur

Sumber: Jatimprov.go.id

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara $111^{\circ}0' - 114^{\circ}4'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}12' - 8^{\circ}48''$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km^2 yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70 persen atau 42.541 km^2 , sementara luas Kepulauan Madura 11,30% atau sebesar 5.422 km^2 . Jumlah penduduknya pada tahun 2010 mencapai 37.476.757 jiwa (Sumber: BPS dalam Jatimprov.go.id).

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 38 kabupaten/kota dengan batas-batas sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.

Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut:

Tabel 4.1 Administrasi Jawa Timur

Bakorwil	Kabupaten/Kota	Bakorwil	Kabupaten/Kota
Bakorwil I (Madiun)	Kota Madiun	Bakorwil III (Malang)	Kota Malang
	Kabupaten Madiun		Kabupaten Malang
	Kabupaten Magetan		Kota Batu
	Kabupaten Ponorogo		Kota Pasuruan
	Kabupaten Pacitan		Kabupaten Pasuruan
	Kabupaten Ngawi		Kota Probolinggo
	Kabupaten Trenggalek		Kabupaten Probolinggo
	Kabupaten Tulungagung		Kabupaten Lumajang
	Kota Blitar		Kabupaten Jember
	Kabupaten Blitar		Kabupaten Bondowoso
Bakorwil II (Bojonegoro)	Kabupaten Nganjuk	Bakorwil IV (Pamekasan)	Kabupaten Situbondo
	Kabupaten Bojonegoro		Kabupaten Banyuwangi
	Kabupaten Tuban		Kota Surabaya
	Kota Mojokerto		Kabupaten Sidoarjo
	Kabupaten Mojokerto		Kabupaten Gresik
	Kota Kediri		Kabupaten Bangkalan
	Kabupaten Kediri		Kabupaten Sampang
	Kabupaten Jombang		Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Lamongan	Kabupaten Sumenep		

Sumber: Jatimprov.go.id

Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah Suku Jawa, namun demikian, entitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Umumnya Suku Jawa menganut agama Islam, sebagian menganut agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

Jawa Timur memiliki kesenian dan kebudayaan yang khas, Reog dan Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timur yang sangat terkenal. Selain keseniannya yang begitu mendunia, kebesaran Jawa Timur juga tercermin dari aneka ragam budayanya. Antara lain karapan sapi, pacuan sapi yang hanya ada di Madura, yang diilhami dari petani membajak sawah dengan sapi yang merupakan kebiasaan masyarakat Madura.

4.1.2 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur

Indeks pembangunan manusia merupakan ukuran kualitas hidup. Terdapat empat komponen dalam menghitung indeks pembangunan manusia, antara lain; angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran

per kapita riil. Berikut Tabel indeks pembangunan manusia per kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2013.

Tabel 4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013

No.	Kabupaten/Kota	IPM					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten Bangkalan	63,40	64,00	64,51	65,01	65,69	66,19
2	Kabupaten Banyuwangi	67,80	68,36	68,89	69,58	70,53	71,02
3	Kabupaten Blitar	72,74	73,22	73,67	74,06	74,43	74,92
4	Kabupaten Bojonegoro	65,83	66,38	66,92	67,32	67,74	68,32
5	Kabupaten Bondowoso	61,26	62,11	62,94	63,81	64,98	65,39
6	Kabupaten Gresik	73,49	73,98	74,47	75,17	75,97	76,36
7	Kabupaten Jember	63,71	64,33	64,95	65,53	65,99	66,60
8	Kabupaten Jombang	71,85	72,33	72,70	73,14	73,86	74,47
9	Kabupaten Kediri	70,85	71,33	71,75	72,28	72,72	73,29
10	Kabupaten Lamongan	68,33	69,03	69,63	70,52	71,05	71,81
11	Kabupaten Lumajang	66,65	67,26	67,82	68,55	69,00	69,50
12	Kabupaten Madiun	68,63	69,28	70,18	70,50	70,88	71,46
13	Kabupaten Magetan	71,79	72,32	72,72	73,17	73,85	74,34
14	Kabupaten Malang	69,55	70,09	70,54	71,17	71,94	72,34
15	Kabupaten Mojokerto	72,51	72,93	73,39	73,89	74,42	75,26
16	Kabupaten Nganjuk	69,73	70,27	70,76	71,48	71,96	72,49
17	Kabupaten Ngawi	68,02	68,41	68,82	69,73	70,20	70,86
18	Kabupaten Pacitan	70,91	71,45	72,07	72,48	72,88	73,36
19	Kabupaten Pamekasan	63,13	63,81	64,60	65,48	66,51	67,17
20	Kabupaten Pasuruan	66,02	66,84	67,61	68,24	69,17	69,77
21	Kabupaten Ponorogo	69,07	69,75	70,29	71,15	71,91	72,61
22	Kabupaten Probolinggo	61,44	62,13	62,99	63,84	64,35	65,19
23	Kabupaten Sampang	57,66	58,68	59,70	60,78	61,67	62,39
24	Kabupaten Sidoarjo	75,35	75,88	76,35	76,9	77,36	78,15
25	Kabupaten Situbondo	63,06	63,69	64,26	64,67	65,06	65,73
26	Kabupaten Sumenep	64,24	64,82	65,60	66,01	66,41	66,89
27	Kabupaten Trenggalek	72,15	72,72	73,24	73,66	74,45	74,44
28	Kabupaten Tuban	67,02	67,68	68,31	68,71	74,09	70,04
29	Kabupaten Tulungagung	72,45	72,93	73,34	73,76	69,18	74,79
30	Kota Batu	73,33	73,88	74,45	74,93	75,42	76,09
31	Kota Blitar	76,60	76,98	77,42	77,89	78,31	78,70
32	Kota Kediri	75,11	75,68	76,28	76,79	77,20	77,80
33	Kota Madiun	75,89	76,23	76,61	77,07	77,50	78,17
34	Kota Malang	76,19	76,69	77,20	77,76	78,43	78,78
35	Kota Mojokerto	76,11	76,43	77,02	77,50	78,01	78,66
36	Kota Pasuruan	72,60	73,01	73,45	73,89	74,33	74,75
37	Kota Probolinggo	73,29	73,73	74,33	74,85	75,44	75,94
38	Kota Surabaya	76,36	76,82	77,28	77,85	78,33	78,97
	Provinsi Jawa Timur	70,38	71,06	71,62	72,18	72,83	73,54

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2013

Selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur mengalami peningkatan dari 70,38 pada tahun 2008 hingga menjadi 73,54 pada tahun 2013. Peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia ini tentu saja didorong dengan komponen yang ada didalamnya, yaitu; angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil disesuaikan.

4.1.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pembangunan perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah khususnya pada sektor kesehatan merupakan bagian dari anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dari beberapa sektor lainnya untuk memperbaiki fasilitas kesehatan ataupun untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Keadaan pengeluaran pemerintah pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, menurut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dilihat dari total keseluruhannya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami kenaikan. Berikut Tabel kondisi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2013 dalam miliar rupiah.

Tabel 4.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013 (Miliar Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten Bangkalan	85.770	98.642	133.753	Rp181.759
2	Kabupaten Banyuwangi	65.881	74.293	154.041	Rp191.542
3	Kabupaten Blitar	82.575	84.545	96.554	133.734
4	Kabupaten Bojonegoro	125.520	126.537	170.535	231.349
5	Kabupaten Bondowoso	87.853	107.532	116.703	125.381
6	Kabupaten Gresik	145.170	173.663	185.572	277.137
7	Kabupaten Jember	167.924	204.949	227.944	300.305
8	Kabupaten Jombang	148.589	155.122	179.395	221.379
9	Kabupaten Kediri	104.878	148.906	163.769	242.661
10	Kabupaten Lamongan	108.397	121.601	155.350	172.573
11	Kabupaten Lumajang	95.759	107.056	125.604	159.431
12	Kabupaten Madiun	60.870	94.383	99.029	126.198
13	Kabupaten Magetan	91.932	101.611	119.428	124.596
14	Kabupaten Malang	120.375	153.130	170.324	185.960
15	Kabupaten Mojokerto	71.079	85.673	122.996	146.649
16	Kabupaten Nganjuk	132.495	147.072	175.046	214.686
17	Kabupaten Ngawi	75.314	39.039	110.764	131.350
18	Kabupaten Pacitan	60.557	72.943	96.737	110.999
19	Kabupaten Pamekasan	84.601	102.066	125.548	134.642
20	Kabupaten Pasuruan	146.759	141.347	154.635	208.454

Lanjutan Tabel 4.3...

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
21	Kabupaten Ponorogo	112.921	107.093	148.442	159.109
22	Kabupaten Probolinggo	75.236	89.936	126.430	152.839
23	Kabupaten Sampang	67.904	70.374	91.023	121.316
24	Kabupaten Sidoarjo	226.621	246.609	342.967	433.261
25	Kabupaten Situbondo	63.484	100.280	111.159	127.818
26	Kabupaten Sumenep	89.769	101.784	133.262	168.311
27	Kabupaten Trenggalek	79.913	101.177	121.682	139.028
28	Kabupaten Tuban	102.167	124.929	136.051	154.385
29	Kabupaten Tulungagung	108.922	133.819	158.339	164.178
30	Kota Blitar	79.298	64.669	71.005	86.255
31	Kota Kediri	127.777	151.220	176.288	201.992
32	Kota Madiun	30.983	40.806	55.078	89.186
33	Kota Malang	34.605	691.331	80.384	128.510
34	Kota Mojokerto	99.959	90.383	110.670	100.370
35	Kota Pasuruan	41.302	53.240	50.381	72.014
36	Kota Probolinggo	56.058	81.824	78.301	92.889
37	Kota Surabaya	312.014	557.292	716.914	693.756
38	Kota Batu	19.399	20.771	20.260	24.184
	Provinsi Jawa Timur	1.237.179	1.737.417	1.838.068	2.070.310

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah), 2014

Dalam Tabel 4.3 terlihat bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2013 cenderung semakin meningkat apabila dilihat dari total keseluruhan. Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terlihat dari tahun 2010 dengan total pengeluaran sektor kesehatan Rp1.237.179 menjadi Rp1.737.417 pada tahun 2011. Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terjadi lagi di tahun 2012 menjadi Rp1.838.068 serta pada akhirnya di tahun 2013 peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan menjadi Rp2.070.310. Hal ini cukup beralasan mengingat kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Timur relatif terus membaik selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

4.1.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah khususnya pada sektor pendidikan merupakan bagian dari anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dari beberapa sektor lainnya untuk memperbaiki sarana maupun prasarana pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan.

Keadaan pengeluaran pemerintah pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, menurut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2010

sampai dengan tahun 2013 dilihat dari total keseluruhannya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami kenaikan. Berikut Tabel kondisi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2013 dalam miliar rupiah:

Tabel 4.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013 (Miliar Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten Bangkalan	320.396	547.552	508.448	526.901
2	Kabupaten Banyuwangi	186.850	344.766	816.841	809.353
3	Kabupaten Blitar	451.300	670.845	771.254	796.743
4	Kabupaten Bojonegoro	380.169	682.099	735.958	839.952
5	Kabupaten Bondowoso	279.862	345.957	443.122	508.402
6	Kabupaten Gresik	298.199	465.901	516.098	567.829
7	Kabupaten Jember	552.401	907.559	1.050.270	1.186.384
8	Kabupaten Jombang	393.040	535.398	587.418	594.720
9	Kabupaten Kediri	482.487	632.500	755.409	782.779
10	Kabupaten Lamongan	372.273	624.654	692.143	721.600
11	Kabupaten Lumajang	325.247	561.957	544.505	659.998
12	Kabupaten Madiun	291.756	476.718	504.110	553.067
13	Kabupaten Magetan	354.814	439.975	546.499	607.296
14	Kabupaten Malang	549.417	810.867	752.250	787.855
15	Kabupaten Mojokerto	370.551	440.069	457.830	489.610
16	Kabupaten Nganjuk	412.045	561.400	549.302	838.489
17	Kabupaten Ngawi	339.048	84.924	562.406	639.528
18	Kabupaten Pacitan	272.220	416.923	466.943	490.438
19	Kabupaten Pamekasan	331.985	418.201	536.369	637.661
20	Kabupaten Pasuruan	378.873	676.572	701.493	843.215
21	Kabupaten Ponorogo	372.821	640.474	620.268	676.885
22	Kabupaten Probolinggo	319.644	488.613	550.373	578.998
23	Kabupaten Sampang	203.601	341.243	459.482	502.898
24	Kabupaten Sidoarjo	525.199	710.390	787.518	853.947
25	Kabupaten Situbondo	261.942	383.581	440.418	488.790
26	Kabupaten Sumenep	341.266	517.062	551.843	677.761
27	Kabupaten Trenggalek	343.284	553.375	549.219	472.050
28	Kabupaten Tuban	395.553	579.423	602.510	674.884
29	Kabupaten Tulungagung	435.477	532.743	605.978	620.550
30	Kota Batu	103.859	134.056	149.538	153.250
31	Kota Blitar	102.179	167.258	181.988	222.894
32	Kota Kediri	196.633	246.767	288.025	330.231

Lanjutan Tabel 4.4...

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
33	Kota Madiun	174.350	215.075	254.105	298.719
34	Kota Malang	285.405	430.310	512.812	599.660
35	Kota Mojokerto	76.330	96.551	121.970	159.578
36	Kota Pasuruan	131.980	147.674	151.002	158.341
37	Kota Probolinggo	131.934	194.520	197.114	214.697
38	Kota Surabaya	901.865	1.544.994	1.470.439	1.518.768
	Provinsi Jawa Timur	12.646.255	18.568.946	20.993.270	23.084.721

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah), 2014

Dalam Tabel 4.4 terlihat bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2013 cenderung semakin meningkat apabila dilihat dari total keseluruhan. Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terlihat dari tahun 2010 dengan total pengeluaran sektor kesehatan Rp12.646.255 menjadi Rp18.568.946 pada tahun 2011. Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terjadi lagi di tahun 2012 menjadi Rp20.993.270 serta pada akhirnya di tahun 2013 peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan menjadi Rp23.084.721. Hal ini cukup beralasan mengingat kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Timur relatif terus membaik selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

4.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan dengan menggunakan tahun dasar 2000. Berikut Tabel laju pertumbuhan ekonomi per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2013:

Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan PDRB Tahun Dasar 2000 (Persentase)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten Pacitan	6,07	6,53	6,67	6,73	6,02
2	Kabupaten Ponorogo	5,01	5,78	6,21	6,52	5,67
3	Kabupaten Trenggalek	5,64	6,11	6,46	6,62	6,21
4	Kabupaten Tulungagung	6,01	6,48	6,73	6,99	6,63
5	Kabupaten Blitar	5,18	6,08	6,33	6,35	6,18
6	Kabupaten Kediri	4,95	6,04	6,20	6,98	6,52
7	Kabupaten Malang	5,25	6,27	7,17	7,44	6,65
8	Kabupaten Lumajang	5,46	5,92	6,26	6,43	6,51
9	Kabupaten Jember	5,55	6,05	7,00	7,21	6,90

Lanjutan Tabel 4.5...

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
10	Kabupaten Banyuwangi	6,05	6,22	7,16	7,21	6,76
11	Kabupaten Bondowoso	5,01	5,64	6,20	6,45	6,27
12	Kabupaten Situbondo	5,15	5,75	6,31	6,54	6,87
13	Kabupaten Probolinggo	5,72	6,19	6,23	6,55	6,58
14	Kabupaten Pasuruan	5,31	6,14	7,02	7,23	6,97
15	Kabupaten Sidoarjo	4,91	5,63	6,90	7,13	7,04
16	Kabupaten Mojokerto	5,21	6,78	7,03	7,21	6,92
17	Kabupaten Jombang	5,28	6,12	6,83	6,97	6,44
18	Kabupaten Nganjuk	6,03	6,28	6,42	6,68	6,73
19	Kabupaten Madiun	5,08	5,92	6,41	6,43	6,37
20	Kabupaten Magetan	5,36	5,79	6,16	6,39	6,67
21	Kabupaten Ngawi	5,65	6,09	6,14	6,75	6,98
22	Kabupaten Bojonegoro	10,1	11,84	9,19	5,68	5,30
23	Kabupaten Tuban	5,99	6,22	7,13	6,36	7,03
24	Kabupaten Lamongan	6,31	6,89	7,02	7,13	6,90
25	Kabupaten Gresik	9,30	6,89	7,39	7,43	7,14
26	Kabupaten Bangkalan	4,96	5,44	6,12	6,50	6,32
27	Kabupaten Sampang	4,64	5,34	6,04	6,12	5,74
28	Kabupaten Pamekasan	5,19	5,75	6,21	6,32	6,28
29	Kabupaten Sumenep	4,44	5,64	6,24	6,33	6,44
30	Kota Kediri	5,06	5,91	7,93	7,51	6,45
31	Kota Blitar	6,21	6,32	6,59	6,78	6,57
32	Kota Malang	6,21	6,25	7,08	7,57	7,30
33	Kota Probolinggo	5,35	6,12	6,58	6,89	6,81
34	Kota Pasuruan	5,03	5,66	6,29	6,46	6,54
35	Kota Mojokerto	5,14	6,09	6,48	7,08	6,86
36	Kota Madiun	6,06	6,93	7,18	7,79	8,07
37	Kota Surabaya	5,53	7,09	7,56	7,62	7,34
38	Kota Batu	6,99	7,52	8,04	8,25	8,20
	Provinsi Jawa Timur	5,01	6,68	7,22	7,27	6,55

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2013

Secara umum terdapat 9 sektor yang terdapat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan, antara lain; (1) pertanian, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan (9) Jasa-jasa.

Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 (Miliar Rupiah)

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	50.208.896	51.329.548	52.628.433	54.463.942	55.330.095
Pertambangan dan Penggalian	7.104.816	7.757.319	8.228.632	8.419.507	8.697.627
Industri Pengolahan	83.299.893	86.900.779	92.171.191	98.017.056	103.497.232
Listrik, gas dan air bersih	4.361.515	4.642.081	4.932.084	5.238.431	5.486.499

Lanjutan Tabel 4.6...

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Konstruksi	10.307.883	10.992.599	11.994.825	12.840.565	14.006.020
Perdagangan, hotel dan restoran	95.983.867	106.229.112	116.645.214	128.375.498	139.431.307
Pengangkutan dan komunikasi	22.781.527	25.076.424	27.945.256	30.640.913	33.837.742
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	17.395.393	18.659.490	20.186.109	21.782.339	23.455.842
Jasa-jasa	29.417.374	30.693.407	32.251.530	33.884.591	35.686.078
Jumlah	29.417.374	30.693.407	32.251.530	33.884.591	35.686.078

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2013

Selama tahun 2009-2013 pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur di dorong oleh 3 sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan hotel dan restoran. Pada tahun 2013 sektor perdagangan hotel dan restoran merupakan sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Timur yaitu sebanyak Rp139.431.307, sedangkan posisi kedua di tempati oleh sektor industri pengolahan sebanyak Rp103.497.232 dan posisi ke tiga di tempati oleh sektor pertanian sebanyak Rp55.330.095. Sedangkan Listrik, air, dan gas memberikan kontribusi terendah terhadap besar PDRB Jawa Timur yaitu hanya sebesar Rp5.486.499.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur diestimasi dengan menggunakan data panel 38 kabupaten/kota sebagai *cross section* dan 8 tahun sebagai *time series* dengan observasi total observasi 304 data (menjadi 301 data karena terdapat data kosong). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen tahun 2006-2013.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model *fixed effect* dan *random effect*.

4.2.2 Analisis Regresi Data Panel

Regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode dalam pengolahannya yaitu metode *fixed effect* dan metode *random effect*. Metode *fixed effect* digunakan dalam memprediksi adanya kemungkinan masalah yang akan dapat merubah *intercept* pada *time series* dan *cross section*. Metode *random effect* dalam data panel disebut juga dengan pendekatan autokelaras yang diasumsikan terdapat kolerasi pada observasi *time series*. Sehingga dibutuhkan untuk mengkoreksi menggunakan koefisien kolerasi dan pendekatan tersebut menggunakan estimasi varians residual *cross section*. Berikut hasil regresi data panel *fixed effect* dan *random effect* ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect* dan *Random Effect*

Variabel Independent	Fixed Effect		Random Effect	
	t-Statistic	Prob.	t-Statistic	Prob.
C	36.10922	0.0000	30.82315	0.0000
PPS	11.65123	0.0000	11.66026	0.0000
PPD	4.514019	0.1341	4.383107	0.0000
PE	1.502657	0.0000	1.649440	0.1001
R-squared	0.975704		Weighted Statistics	0.659361
			Unweighted Statistics	-0.048964
Durbin Watson	1.692709		Weighted Statistics	1.436858
			Unweighted Statistics	0.038995

Sumber: Lampiran B dan C, (diolah)

Hasil regresi dengan dua metode (*fixed effect* dan *random effect*) yang ditunjukkan Tabel 4.7 diatas memperlihatkan bahwa pada model *fixed effect* mempunyai semua variabel yang memberikan hasil signifikan yaitu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PPS), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPD) dan pertumbuhan ekonomi (PE). Nilai R^2 pada model *fixed effect* memberikan nilai yang tinggi sebesar 0.975704. Sedangkan pada model *random effect* memiliki nilai R^2 0.659361 sangat kecil dibanding dengan *fixed effect*. Durbin Watson statistiknya *fixed effect* sebesar 1.692709 sedangkan Durbin Watson pada *random effect* memiliki nilai yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan Durbin Watson *fixed effect* yaitu 1.436858.

4.2.3 Uji Kesesuaian Model

Tujuan dilakukan uji kesesuaian model adalah untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan dalam mengestimasi pengaruh variabel. Berdasarkan hasil estimasi model menggunakan data panel dengan dua pendekatan yaitu metode *fixed effect* dan *random effect*, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian *Hausman test*.

Uji Hausman dilakukan untuk memilih kesesuaian model menggunakan *fixed effect* atau *random effect*. Statistik uji Hausman mengikuti *chi square* dengan *degree of freedom* sebanyak jumlah variabel bebas dari model (Nurcahyono, 2014: 26). Dengan ketentuan H_0 dari uji Hausman yaitu *random effect* dan H_1 dari *fixed effect*. Adapun hasil uji Hausman pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects – Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	10.878396	3	0.0124

Sumber: Lampiran D, (dioalah)

Dari hasil *Hausman test* di atas menunjukkan bahwa nilai kritis *statistic chi square* 10.878396 dan angka probabilitasnya 0.0124 yang menunjukkan nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0.05. Sehingga dengan demikian hipotesis nol (H_0) ditolak dan model yang digunakan *fixed effect*.

4.2.4 Hasil Analisis Data Panel dengan *Fixed Effect*

Pengolahan data panel dengan *fixed effect* secara umum dilakukan dengan *Pooled Least Squares*. Hasil pengolahan analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan *fixed effect* bertujuan untuk mengetahui besarnya koefisien regresi dari pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Keputusan yang digunakan dalam membandingkan antara nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Berikut adalah hasil estimasi persamaan

regresi pooled data dengan pendekatan *fixed effect* dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Hasil Regresi Data Panel dengan Pendekatan Fixed Effect

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 08/29/15 Time: 14:09

Sample: 2006 2013

Periods included: 8

Cross-sections included: 38

Total panel (unbalanced) observations: 301

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.49326	1.176798	36.10922	0.0000
LOGPPS	1.775316	0.152371	11.65123	0.0000
LOGPPD	0.586615	0.129954	4.514019	0.0000
PE	0.080097	0.053304	1.502657	0.1341

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.975704	Mean dependent var	70.45841
Adjusted R-squared	0.971966	S.D. dependent var	4.888130
S.E. of regression	0.818439	Akaike info criterion	2.563162
Sum squared resid	174.1592	Schwarz criterion	3.068117
Log likelihood	-344.7558	Hannan-Quinn criter.	2.765223
F-statistic	261.0308	Durbin-Watson stat	1.692709
Prob(F-statistic)	0.000000		

Cross ID	Effect
_Kabupaten Bangkalan	-6.079219
_Kabupaten Banyuwangi	-2.065507
_Kabupaten Blitar	2.679053
_Kabupaten Bojonegoro	-4.763797
_Kabupaten Bondowoso	-7.658581
_Kabupaten Gresik	3.458985
_Kabupaten Jember	-7.350136
_Kabupaten Jombang	1.313075
_Kabupaten Kediri	0.334559
_Kabupaten Lamongan	-1.593358
_Kabupaten Lumajang	-3.162373
_Kabupaten Madiun	-0.429803
_Kabupaten Magetan	1.904106
_Kabupaten Malang	-0.887909
_Kabupaten Mojokerto	2.874538

Lanjutan Tabel 4.9...

Cross ID	Effect
_Kabupaten Nganjuk	-0.829064
_Kabupaten Ngawi	-1.394602
_Kabupaten Pacitan	1.796505
_Kabupaten Pamekasan	-5.849398
_Kabupaten Pasuruan	-3.569218
_Kabupaten Ponorogo	-0.878949
_Kabupaten Probolinggo	-7.618087
_Kabupaten Sampang	-1.073543
_Kabupaten Sidoarjo	3.770226
_Kabupaten Situbondo	-6.036419
_Kabupaten Sumenep	-5.553154
_Kabupaten Trenggalek	2.613575
_Kabupaten Tuban	-1.955881
_Kabupaten Tulungagung	1.443643
_Kota Batu	7.224198
_Kota Blitar	8.118945
_Kota Kediri	5.092072
_Kota Madiun	7.996434
_Kota Malang	7.632332
_Kota Mojokerto	7.453531
_Kota Pasuruan	4.429058
_Kota Probolinggo	4.491642
_Kota Surabaya	3.947516

Sumber: Lampiran B, (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.9 menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect* dapat dilihat bagaimana pengaruh variabel independen pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PPS), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPD) dan pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Estimation Command:

```
=====
LS(CX=F) IPM C LOGPPS LOGPPD PE
```

Estimation Equation:

```
=====
IPM = C(1) + C(2)*LOGPPS + C(3)*LOGPPD + C(4)*PE + [CX=F]
```

Substituted Coefficients:

```
=====
IPM = 42.4932562094 + 1.77531551112*LOGPPS + 0.586614935781*LOGPPD + 0.0800973726309*PE +
[CX=F]
```


Hasil estimasi *fixed effect* dapat diinterpretasikan bahwa nilai koefisien dari setiap wilayah menunjukkan besarnya rata-rata perubahan indeks pembangunan manusia pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Nilai intersep masing-masing daerah tampak terlihat nilai koefisien intersep indeks pembangunan manusia dari setiap kabupaten/kota memiliki nilai koefisien yang berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan karena daerah yang diteliti memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Daerah yang mempunyai perubahan tertinggi yaitu Kota Blitar sebesar 8.118945 dan daerah yang memiliki nilai paling rendah adalah Kabupaten Bondowoso dengan nilai cross id -7.658581.

Nilai koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan (PPS) untuk masing-masing kabupaten/kota memiliki nilai sebesar 1.775316. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara statistik signifikan pada $\alpha = 0.05$ dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dapat diterima, karena setiap kali terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan akan merangsang pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.

Selanjutnya, nilai koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPD) untuk masing-masing kabupaten/kota sebesar 0.586615. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara statistik signifikan pada $\alpha = 0.05$ dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dapat diterima, karena setiap kali terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan maka akan merangsang pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.

Koefisien variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai koefisien sebesar 0.080097 dan memperoleh probabilitas signifikansi sebesar 0.1341 lebih besar dari ketentuan taraf signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan

bahwa hipotesis yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia ditolak, karena setiap terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.

4.2.5 Uji Statistik

1. Pengujian Simultan (Uji F)

Uji F merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh semua variabel secara bersama-sama yaitu variabel independen antara lain; pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependen (variabel terikat) yaitu indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, hasil dari uji secara simultan (uji F), uji parsial (uji t), dan koefisien determinasi berganda (R^2) dapat ditunjukkan dalam Tabel 4.9:

Hipotesis pengujian uji F:

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, Dengan kata lain seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

$H_1 : b_1, b_2, b_3 \neq 0$, Dengan kata lain seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

Kriteria pengujian:

- c) Jika probabilitas F hitung $\leq \alpha$ (0.05), dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- d) Jika probabilitas F hitung $\geq \alpha$ (0.05), dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Probabilitas F-statistik = 0.000000 \leq nilai probabilitas $\alpha = 5\%$, berarti H_1 diterima yang artinya seluruh variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PPS), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPD) dan pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

2. Pengujian Parsial (Uji t)

Tujuan dilakukan uji t dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PPS), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPD) dan pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap variabel terikat indeks pembangunan manusia (IPM).

Hipotesis pengujian uji t:

d) Hipotesis pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

$H_0: b_1 = 0$, berarti variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

$H_1: b_1 \neq 0$, berarti variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

e) Hipotesis pengeluaran pemerintah sektor pendidikan

$H_0: b_2 = 0$, berarti variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

$H_1: b_2 \neq 0$, berarti variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

f) Hipotesis pertumbuhan ekonomi

$H_0: b_3 = 0$, berarti variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

$H_1: b_3 \neq 0$, berarti variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

Kriteria pengambilan keputusan:

- c) Jika probabilitas t hitung $\leq \alpha$ (0.05), dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

- d) Jika probabilitas t hitung $\geq \alpha$ (0.05), dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dari hasil uji t menggunakan pendekatan fixed effect dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 4.10 Nilai (Uji t) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi erhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur

Variabel	Probabilitas	Signifikansi ($\alpha=5\%$)	Keterangan
PPS	0.0000	0.05	Signifikan
PPD	0.0000	0.05	Signifikan
PE	0.1341	0.05	Tidak Signifikan

Sumber: Lampiran B, (diolah)

Dengan probabilitas t hitung variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan = 0.0000 \leq nilai probabilitas $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki probabilitas t hitung = 0.0000 \leq nilai probabilitas $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Selanjutnya, nilai probabilitas t hitung variabel pertumbuhan ekonomi = 0.1341 \geq nilai probabilitas $\alpha = 5\%$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima yang artinya variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

2. Pengujian Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada umumnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol (0) dan satu (1). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin tepat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel tak bebas. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi, maka semakin lemah kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel tak bebas.

Hasil perhitungan pada Tabel 4.9 menunjukkan nilai adjusted R-squared = 0.975704, dengan demikian dapat diartikan bahwa total variasi Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan oleh variabel independen pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PPS), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPD) dan pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 97,57% sedangkan sisanya 2,43% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.2.6 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini dilakukan dengan adanya tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam Tabel 4.11 akan dikehauai hasil dari uji multikolinearitas.

Uji multikolinearitas menggunakan uji korelasi sederhana, hasil dari uji multikolinearitas menggunakan korelasi sederhana dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas Korelasi Sederhana

	PPS	PPD	PE
PPS	1.000000	0.758719	0.175171
PPD	0.758719	1.000000	0.180882
PE	0.175171	0.180882	1.000000

Sumber: Lampiran E, (diolah)

Menurut Gujarati (2012: 251) indikasi terjadinya multikolinearitas adalah korelasi sederhana yang relatif tinggi (0.8 atau lebih) antara satu atau lebih pasang variabel bebas. Jika koefisien korelasi kurang dari 0.8 berarti tidak terjadi multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas pada Tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwasanya nilai korelasi dari antar variabel berada di bawah 0.8, sehingga dapat dikatakan tidak adanya multikolinearitas antar variabel bebas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Uji Park. Uji Park merupakan prosedur dua tahap, pada tahap pertama kita lakukan regresi OLS dengan mengabaikan heteroskedastisitas, kemudian didapatkan \hat{u}_i^2 . Pada tahap kedua dilakukan regresi dan $\ln \hat{u}_i^2 = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$. Kriteria pengujian menggunakan Uji Park:

1. Apabila $\beta \leq 0.05$, maka heteroskedastik terjadi pada data.
2. Apabila $\beta \geq 0.05$, maka heteroskedastik tidak terjadi pada data.

Hasil dari pengujian heteroskedastisitas menggunakan Uji Park dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Park

Variabel	Probabilitas		Signifikan	Keterangan
LOGRES ² (IPM)	0.1416	\geq	0.05	Tidak Signifikan
LOGPPS	0.4755	\geq	0.05	Tidak Signifikan
LOGPPD	0.2977	\geq	0.05	Tidak Signifikan
PE	0.3475	\geq	0.05	Tidak Signifikan

Sumber: Lampiran F, (diolah)

Hasil menggunakan Uji Park pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yaitu 0.4755, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 0.2977 dan pertumbuhan ekonomi 0.3475 dengan keseluruhan dianggap lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada data.

3. Uji Autokorelasi

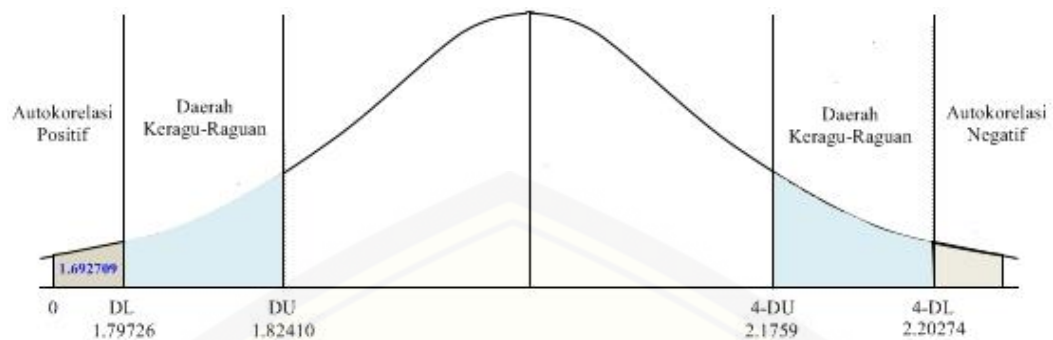
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar anggota dalam observasi. Adapun kriteria pengujian *Durbin-Watson*, antara lain:

Tabel 4.13 Kriteria Pengujian *Durbin-Watson*

Nilai d hitung	Keputusan
$0 \leq DW \leq DL$	Autokorelasi positif
$DL \leq DW \leq DU$	Daerah keragu-raguan
$2 \leq DW \leq 4-DU$	Tidak terdapat autokorelasi
$4-DU \leq DW \leq 4-DL$	Daerah keragu-raguan
$4-DL \leq DW \leq D$	Autokorelasi negatif

Sumber: Ariefianto (2012: 30)

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh adalah 1.692709 dengan batas DL 1.79726 dan batas DU 1.82410. Nilai *Durbin-Watson* 1.692709 lebih kecil dari nilai DL 1.79051 yang artinya terdapat autokorelasi positif, dan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2 Letak Koefisien *Durbin-Watson* (1.692709)

Sumber: Pusattesis.com. Lampiran G, (diolah)

Data panel merupakan data gabungan dari *time series* dan *cross section* sedangkan menurut Rahayu (2009: 17) autokorelasi sering terjadi dikarenakan adanya variabel-variabel penjelas yang dihilangkan dari model. Seperti diketahui bahwa kebanyakan variabel-variabel ekonomi cenderung mengandung autokorelasi, dimana nilai-nilai dari periode sekarang akan tergantung pada periode sebelumnya. Jika variabel yang memiliki sifat autokorelasi dihilangkan atau dikeluarkan dari model atau dipisahkan dari sekumpulan variabel penjelas yang lain, maka akan berpengaruh yang direfleksikan dalam variabel gangguan e , sehingga nilai-nilai dari gangguan akan mengandung autokorelasi. Kejadian ini sering disebut “*quasi-autocorrelation*,” karena merupakan pola autokorelasi dari variabel penjelas (X) yang dihilangkan muncul dalam model regresi yang digunakan sehingga tidak menunjukkan pola perilaku dari nilai-nilai e yang sesungguhnya.

Ariefianto (2012: 27) juga memberikan pendapatnya tentang penyebab autokorelasi, yaitu; *Inertia* salah satu karakteristik umum dari data yang bersifat *time series* adalah adanya *inertia (sluggishness)*. Penyesuaian akibat suatu guncangan terhadap variabel makroekonomi adalah bersifat bertahap dan berlangsung sepanjang waktu tertentu. Hal ini juga terjadi pada sekelompok variabel, dengan demikian kita dapat mengobservasi adanya pergerakan bersama, misalnya; GDP, pengangguran, dan tingkat harga yang sebenarnya disebabkan adanya guncangan pada variabel-variabel tersebut dan mereka saat ini berada dalam penyesuaian menuju ekuilibrium. Dalam kondisi ini tentu saja model

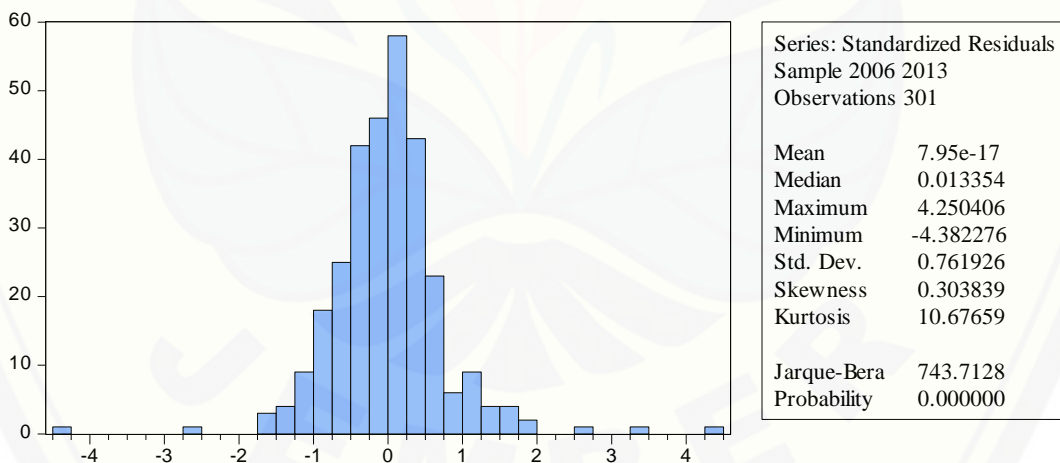
regresi yang menggunakan variabel-variabel dimaksud akan mengalami autokorelasi.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu yang memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak digunakan uji *Jarque-Bera* (J-B test). Adapun kriteria pengujian *Jarque-Bera* (J-B test), antara lain:

- Bila nilai JB hitung \geq nilai X^2 Tabel atau nilai probabilitas J-B hitung \leq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, *error term* adala berdistribusi normal ditolak;
- Bila nilai JB hitung \leq nilai X^2 Tabel nilai probabilitas J-B hitung \geq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* adalah berdistribusi normal diterima.

Hasil dari uji normalitas menggunakan uji *Jarque-Bera* (J-B test) dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut:



Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas
Sumber: Lampiran H, (diolah)

Berdasarkan nilai probabilitas X^2 hitung sebesar $0,0000 \leq$ nilai probabilitas $\alpha = 5\%$, dapat ditarik kesimpulan bahwa model empiris tersebut tidak terdistribusi normal karena nilai probabilitas X^2 hitung lebih kecil dibanding nilai probabilitas $\alpha = 5\%$. Menurut Gujarati (2010: 128) ukuran sampel lebih dari 100, maka asumsi

kenormalan dapat diabaikan, dalam penelitian ini sampel yang didapat sebanyak 304 sampel dan mengalami pengurangan menjadi 301 sampel karena terdapat data kosong pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PPS) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013, berarti hipotesis yang menyatakan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur 2006-2013 dapat diterima artinya, indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2013 ditentukan oleh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Hal ini dikarenakan setiap kali pemerintah melakukan peningkatan pengeluarannya khususnya pada sektor kesehatan maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astri (2013) bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Besar atau kecilnya anggaran dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bidang kesehatan dipengaruhi oleh minat masyarakat untuk menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah. Selain itu juga Baeti (2013) yang melakukan penelitian mengenai indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dikarenakan dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memegang peranan penting guna meningkatkan pelayanan. Sejalan dengan peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Didukung teori Suparmoko yang dikutip oleh Desi dalam (Patta, 2012: 31) pengeluaran merupakan investasi yang dapat menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Banyak pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah pengeluaran di bidang kesehatan. Kemudian Schultz dalam Jhinghan (2002: 414) mengemukakan bahwa fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina tenaga serta vitalitas rakyat. Meier, et al (Winarti, 2014: 41), suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan.

Menurut Faturrohmin (2011: 30-31) pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan merupakan dasar dari produktivitas kerja dan kapasitas belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat akan lebih bersemangat dan lebih produktif dalam menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar lebih baik dan akan tumbuh menjadi dewasa dan lebih terdidik. Dengan kata lain kesehatan turut serta membantu peningkatan pembangunan manusia, karena manusia yang sehat akan jauh lebih baik daripada manusia yang kurang sehat. Kesehatan yang baik akan berpengaruh pada perubahan yang baik, sebaliknya kesehatan yang buruk atau kurang baik akan berakibat pada perubahan ke arah yang kurang baik. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013: iii) pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya agar pengelolaan sumber daya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas belanja daerah (*quality of spending*), dengan memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

Untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia, pemerintah perlu melakukan peningkatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah khususnya sektor kesehatan. Karena dengan biaya yang besar yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor kesehatan akan meningkatkan kesehatan dan produktivitas individu serta nantinya dapat meningkatkan pembangunan manusia. Bukan hanya itu saja, anggaran pada sektor kesehatan dapat digunakan sebagai pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan masyarakat.

4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013, berarti hipotesis yang menyatakan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur 2006-2013 dapat diterima, artinya setiap terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan merangsang kenaikan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif, Astri (2013) dan Baeti (2013) bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Diperkuat dengan adanya teori Meier, et al (Winarti, 2014: 41) bahwa Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut. Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan memberikan dua faktor yaitu; pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia (Khusaini dalam Syam, 2014: 21). Hasibuan (1996: 133) peningkatan efisiensi, khususnya efisiensi masyarakat dengan cara meningkatkan investasi di sektor pendidikan, sehingga terdapat keseimbangan yang lebih serasi antara investasi bagi sumber daya manusia dan investasi bagi modal fisik.

Seharusnya, untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan perlu adanya usaha dari pemerintah, salah satunya meningkatkan anggaran pada sektor pendidikan untuk digunakan sebagai

pembangunan sarana pendidikan dan penambahan tenaga guru. Karena dengan biaya yang besar yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor pendidikan akan membantu peningkatan pembangunan manusia, bukan hanya pembangunan manusia yang akan berkembang, melainkan juga pertumbuhan pembangunan sektor lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan.

4.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013 mengindikasikan bahwa hipotesis yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2006-2013 ditolak.

Penelitian Syam (2014) bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dan menganggap bahwa rendahnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah berkontribusi besar terhadap rendahnya capaian IPM Sulawesi Selatan. Rendahnya capaian IPM tersebut menyebabkan kelambanan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Diperkuat dengan teori pertumbuhan klasik (Syam 2014: 7) bahwa kekurangan penduduk dan produksi marjinal lebih tinggi daripada pendapatan per kapita maka, penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Tetapi, apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi marjinal mengalami penurunan yang nantinya akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan terjadi pada pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. W.W Rostow (Syam, 2014: 7) menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental bukan saja dalam corak kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu

masyarakat dan negara. Schumpeter dalam teorinya menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan *entrepreneurship*. Schumpeter (Syam, 2014: 7) berpendapat bahwa kalangan pengusaha yang memiliki kemampuan dan keberanian dalam menciptakan dan mengaplikasikan inovasi-inovasi baru baik dalam masalah produksi, penyusunan teknik tahap produksi maupun sistem manajemennya.

Negara berkembang seperti Indonesia seharusnya memperhatikan sumber daya manusianya. Karena manusia merupakan salah satu faktor produksi sebagai tenaga kerja yang dapat mempengaruhi terjadinya pembangunan perekonomian. Setidaknya pemerintah mengendalikan laju penduduk dengan ketat, sehingga tidak akan terjadi ledakan penduduk yang nantinya akan mengurangi produksi marjinal. Pelatihan kewirausahaan diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi dan manusia sebagai modalnya, sehingga nantinya memiliki kemampuan dan keberanian dalam menciptakan dan mengaplikasikan inovasi-inovasi baru baik dalam masalah produksi, penyusunan teknik tahap produksi maupun sistem manajemennya.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PPS), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPD) dan pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PPS) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2006-2013 maka hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013 dapat diterima, artinya setiap kali pemerintah meningkatkan pengeluaran anggaran khususnya pada sektor kesehatan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astri (2013) dan Baeti (2013) bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Suparmoko yang dikutip oleh Desi dalam (Patta, 2012: 31) pengeluaran merupakan investasi yang dapat menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Banyak pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah pengeluaran di bidang kesehatan. Kemudian Schultz dalam Jhinghan (2002: 414) mengemukakan bahwa fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina tenaga serta vitalitas rakyat. Meier, et al (Winarti, 2014: 41), suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2006-2013 maka hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah

sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013 dapat diterima artinya, setiap kali pemerintah meningkatkan pengeluaran anggaran khususnya pada sektor pendidikan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif, Astri (2013) dan Baeti (2013) bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Meier, et al (Winarti, 2014: 41) bahwa Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut. Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan memberikan dua faktor yaitu; pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia (Khusaini dalam Syam, 2014: 21). Hasibuan (1996: 133) peningkatan efisiensi, khususnya efisiensi masyarakat dengan cara meningkatkan investasi di sektor pendidikan, sehingga terdapat keseimbangan yang lebih serasi antara investasi bagi sumber daya manusia dan investasi bagi modal fisik.

3. Pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur maka hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013 ditolak artinya, setiap kali terjadi peningkatan perekonomian tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syam (2014) bahwa indeks pembangunan manusia

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dan menganggap bahwa rendahnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah berkontribusi besar terhadap rendahnya capaian IPM Sulawesi Selatan. Rendahnya capaian IPM tersebut menyebabkan kelambanan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dan diperkuat teori W.W Rostow (Syam, 2014: 7) menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental bukan saja dalam corak kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara. Schumpeter dalam teorinya menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan *entrepreneurship*. Schumpeter (Syam, 2014: 7) berpendapat bahwa kalangan pengusaha yang memiliki kemampuan dan keberanian dalam menciptakan dan mengaplikasikan inovasi-inovasi baru baik dalam masalah produksi, penyusunan teknik tahap produksi maupun sistem manajemennya.

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PPS), kemiskinan (PPD) dan pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki nilai koefisien yang besar dari variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi maka, disarankan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan memberikan peningkatan anggaran pada sektor kesehatan untuk dialokasikan pada pembangunan manusia terutama di bidang kesehatan. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan ini diharapkan dapat memperbaiki ataupun menambah akses dan fasilitas di bidang kesehatan seperti pembangunan infrastruktur kesehatan (rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik) serta pemberian bantuan kepada

masyarakat kurang mampu agar mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis.

2. Meningkatnya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia, maka disarankan kepada pemerintah untuk terus meningkatkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan ini diharapkan dapat memperbaiki ataupun menambah akses dan fasilitas di bidang pendidikan seperti pembangunan infrastruktur pendidikan (sekolah) serta pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan sekolah gratis sesuai dengan usia wajib sekolah.
3. Pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia disebabkan kurangnya peranan sumber daya manusia dalam membantu perekonomian sehingga, disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan tiap individu atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya, karena masyarakat yang produktif akan membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymouse. 2015. *Pengertian Pembangunan Ekonomi dan Tujuan Pembangunan Ekonomi*.
<http://laportadoradesuenos.blogspot.com/2015/01/pengertian-pembangunan-ekonomi-dan.html> [9 Mei 2015].
- Anwar, M. A., Azis I. J., dan Basri, F. H. 1992. *Ekonomi Indonesia Prospek Jangka Pendek Dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ariefianto, M. D. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Arif, H. (Tanpa Tahun). *Analisi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barati*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.
- Astri, M. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Volume 1, Nomor 1, Maret 2013. ISSN 2302-2663.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia*.
<http://jatim.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab11> [9 Mei 2015].
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2010. *Indeks Pembangunan Manusia 2008-2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2012. *Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2014. *Indeks Pembangunan Manusia 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2009 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Baeti, N. 2013. *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia*

- Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. EDAJ 2 (3) (2013). ISSN 2252-6889.
- Bank Indonesia. (Tanpa Tahun). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Faturrohmin, R. 2011. *Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah.
- Gujarati, D. 1997. *Ekonometrika Dasar, Alih Bahasa Sumarno Zain*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D. N., dan Porter, D. C. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika, edis 5 buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika, edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, S. 1996. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Jhinghan, M. L. 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Deskripsi dan Analisis APBD 2013*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kistanto, I. 2013. *Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Di Jember*. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP-AMP.YKPN.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009*. EDAJ 1 (2012).
- Muchtolifah. 2010. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Mojokerto*. Volume 1, Nomor 1, Januari 2010 hal 1–10.
- Nasir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurchayono, E. 2014. *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi antar Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2012*. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

- Patta, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Perkasa, A. A. 2012. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Mahasiswa UNHAS*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Makassar.
- Portal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (Tanpa Tahun). *Sekilas Jawa Timur*. <http://www.jatimprov.go.id/site/tentang-jawa-timur/> [28 Mei 2015].
- Pratowo, N. I. 2013. *Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Pusattesis.com. 2015. *Uji Autokorelasi*. <http://pusattesis.com/uji-autokorelasi/> [1 Juli 2015].
- Putri, A. M. P. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Rahayu, S. 2009. *Penggunaan Metode Durbin Watson dalam Menyelesaikan Model Regresi yang Mengandung Autokorelasi*. Skripsi. Medan: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara.
- Ramadhani, S. E. 2010. *Dampak Penyaluran Dana Bergulir Usaha Mikro terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Mikro (Studi Kasus Industri Mikro di Kota Payakumbuh)*. Thesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Saputri, R. F. 2014. *Analisis Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Setiawan, M. B.. 2013. *Indeks pembangunan Manusia Indonesia*. Jurnal *Economia* Volume 9, Nomor 1, April 2013.
- Sukirno, S. 2006. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suliswanto, M. S. W. 2010. *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia..* Jurnal *Ekonomi Pembangunan* Volume 8, Nomor 2, Desember 2010.

- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Suparno. H. 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 5 No.1 Bulan Januari Tahun 2014. Hal 1-22.
- Syam, S. F. 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Hasanuddin.
- Todaro, M. P. dan Munandar, H. 2000. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga, jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahid, B. A. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Makassar Periode 1996-2011*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Wajdi, M. 2011. *Paritas Daya Beli*. <http://bunda-bisa.blogspot.com/2011/06/paritas-daya-beli.html> [22 Mei 2015].
- Winarti, A. 2014. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN

Lampiran A. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (PPS) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2013

Nomor	Tahun	Kabupaten/Kota	IPM	PPS	PPD	PE
1	2006	Kabupaten Bangkalan	62,72	Rp40.206	Rp187.337	4,8
1	2007	Kabupaten Bangkalan	62,97	Rp47.208	Rp209.538	5,02
1	2008	Kabupaten Bangkalan	63,4	Rp61.617	Rp250.642	4,92
1	2009	Kabupaten Bangkalan	64	Rp58.837	Rp290.641	4,96
1	2010	Kabupaten Bangkalan	64,51	Rp85.770	Rp320.396	5,44
1	2011	Kabupaten Bangkalan	65,01	Rp98.642	Rp547.552	6,12
1	2012	Kabupaten Bangkalan	65,69	Rp133.753	Rp508.448	6,5
1	2013	Kabupaten Bangkalan	66,19	Rp181.758	Rp526.901	6,32
2	2006	Kabupaten Banyuwangi	66,8	Rp68.624	Rp336.300	4,74
2	2007	Kabupaten Banyuwangi	67,24	Rp79.333	Rp383.728	5,64
2	2008	Kabupaten Banyuwangi	67,8	Rp81.243	Rp427.886	5,8
2	2009	Kabupaten Banyuwangi	68,36	Rp84.389	Rp225.707	6,05
2	2010	Kabupaten Banyuwangi	68,89	Rp65.881	Rp186.849	6,22
2	2011	Kabupaten Banyuwangi	69,58	Rp74.293	Rp344.766	7,16
2	2012	Kabupaten Banyuwangi	70,53	Rp154.040	Rp816.841	7,21
2	2013	Kabupaten Banyuwangi	71,02	Rp191.542	Rp809.353	6,76
3	2006	Kabupaten Blitar	72,05	Rp44.388	Rp276.573	5,38
3	2007	Kabupaten Blitar	72,28	Rp70.656	Rp362.614	5,78
3	2008	Kabupaten Blitar	72,74	Rp74.920	Rp399.983	6,05
3	2009	Kabupaten Blitar	73,22	Rp96.239	Rp463.897	5,18
3	2010	Kabupaten Blitar	73,67	Rp82.574	Rp451.300	6,08
3	2011	Kabupaten Blitar	74,06	Rp84.545	Rp670.845	6,33
3	2012	Kabupaten Blitar	74,43	Rp96.553	Rp771.254	6,35
3	2013	Kabupaten Blitar	74,92	Rp133.734	Rp796.743	6,18
4	2006	Kabupaten Bojonegoro	64,93	Rp42.097	Rp231.584	8,8
4	2007	Kabupaten Bojonegoro	65,5	Rp58.657	Rp256.832	10,56
4	2008	Kabupaten Bojonegoro	65,83	Rp94.881	Rp373.985	10,24
4	2009	Kabupaten Bojonegoro	66,38	Rp114.660	Rp356.364	10,1
4	2010	Kabupaten Bojonegoro	66,92	Rp125.519	Rp380.169	11,84
4	2011	Kabupaten Bojonegoro	67,32	Rp126.537	Rp682.099	9,19
4	2012	Kabupaten Bojonegoro	67,74	Rp170.534	Rp735.958	5,68
4	2013	Kabupaten Bojonegoro	68,32	Rp231.349	Rp839.952	5,3
5	2006	Kabupaten Bondowoso	60,36	Rp45.253	Rp156.390	5,58
5	2007	Kabupaten Bondowoso	60,76	Rp56.539	Rp187.548	5,51

5	2008	Kabupaten Bondowoso	61,26	Rp66.560	Rp193.388	5,31
5	2009	Kabupaten Bondowoso	62,11	Rp75.903	Rp272.959	5,01
5	2010	Kabupaten Bondowoso	62,94	Rp87.852	Rp279.862	5,64
5	2011	Kabupaten Bondowoso	63,81	Rp107.532	Rp345.957	6,2
5	2012	Kabupaten Bondowoso	64,98	Rp116.702	Rp443.122	6,45
5	2013	Kabupaten Bondowoso	65,39	Rp125.380	Rp508.402	6,27
6	2006	Kabupaten Gresik	72,51	Rp58.980	Rp178.227	6,81
6	2007	Kabupaten Gresik	73	Rp69.431	Rp186.193	6,7
6	2008	Kabupaten Gresik	73,49	Rp10.183	Rp231.369	6,34
6	2009	Kabupaten Gresik	73,98	Rp151.698	Rp304.499	10,86
6	2010	Kabupaten Gresik	74,47	Rp145.170	Rp298.199	6,86
6	2011	Kabupaten Gresik	75,17	Rp173.663	Rp465.901	7,39
6	2012	Kabupaten Gresik	75,97	Rp185.572	Rp516.098	7,43
6	2013	Kabupaten Gresik	76,36	Rp277.136	Rp567.829	7,14
7	2006	Kabupaten Jember	63,04	Rp57.344	Rp281.630	5,7
7	2007	Kabupaten Jember	63,27	Rp132.677	Rp395.593	5,98
7	2008	Kabupaten Jember	63,71	Rp135.046	Rp471.037	6,04
7	2009	Kabupaten Jember	64,33	Rp142.683	Rp509.813	5,55
7	2010	Kabupaten Jember	64,95	Rp167.924	Rp552.401	6,05
7	2011	Kabupaten Jember	65,53	Rp204.949	Rp907.559	7
7	2012	Kabupaten Jember	65,99	Rp227.944	Rp1.050.270	7,21
7	2013	Kabupaten Jember	66,6	Rp300.304	Rp1.186.384	6,9
8	2006	Kabupaten Jombang	70,29	Rp55.850	Rp201.302	5,73
8	2007	Kabupaten Jombang	71,44	Rp84.540	Rp27.576	6,07
8	2008	Kabupaten Jombang	71,85	Rp107.202	Rp311.069	5,79
8	2009	Kabupaten Jombang	72,33	Rp128.688	Rp379.507	5,28
8	2010	Kabupaten Jombang	72,7	Rp148.588	Rp393.040	6,12
8	2011	Kabupaten Jombang	73,14	Rp155.122	Rp535.398	6,83
8	2012	Kabupaten Jombang	73,86	Rp179.395	Rp587.418	6,97
8	2013	Kabupaten Jombang	74,47	Rp221.379	Rp594.720	6,44
9	2006	Kabupaten Kediri	69,34	Rp55.333	Rp260.057	4,29
9	2007	Kabupaten Kediri	70,39	Rp71.861	Rp299.941	4,65
9	2008	Kabupaten Kediri	70,85	Rp84.193	Rp346.011	4,49
9	2009	Kabupaten Kediri	71,33	Rp88.165	Rp423.796	4,94
9	2010	Kabupaten Kediri	71,75	Rp104.878	Rp482.487	6,03
9	2011	Kabupaten Kediri	72,28	Rp148.906	Rp632.500	6,2
9	2012	Kabupaten Kediri	72,72	Rp163.769	Rp755.409	6,98
9	2013	Kabupaten Kediri	73,29	Rp242.661	Rp782.779	6,52
10	2006	Kabupaten Lamongan	67,41	Rp52.695	Rp251.867	5,39
10	2007	Kabupaten Lamongan	67,88	Rp78.454	Rp285.877	5,76
10	2008	Kabupaten Lamongan	68,33	Rp86.869	Rp326.531	6,22

10	2009	Kabupaten Lamongan	69,03	Rp77.203	Rp410.517	6,31
10	2010	Kabupaten Lamongan	69,63	Rp108.397	Rp372.273	6,89
10	2011	Kabupaten Lamongan	70,52	Rp121.601	Rp624.654	7,02
10	2012	Kabupaten Lamongan	71,05	Rp155.350	Rp692.143	7,13
10	2013	Kabupaten Lamongan	71,81	Rp172.573	Rp721.600	6,9
11	2006	Kabupaten Lumajang	65,9	Rp48.592	Rp180.348	5,22
11	2007	Kabupaten Lumajang	66,2	Rp73.321	Rp223.257	5,5
11	2008	Kabupaten Lumajang	66,65	Rp78.277	Rp240.977	5,43
11	2009	Kabupaten Lumajang	67,26	Rp103.848	Rp348.624	5,46
11	2010	Kabupaten Lumajang	67,82	Rp95.759	Rp325.247	5,92
11	2011	Kabupaten Lumajang	68,55	Rp107.056	Rp561.957	6,26
11	2012	Kabupaten Lumajang	69	Rp125.603	Rp544.505	6,43
11	2013	Kabupaten Lumajang	69,5	Rp159.430	Rp659.998	6,51
12	2006	Kabupaten Madiun	67,75	Rp0	Rp0	4,6
12	2007	Kabupaten Madiun	68,24	Rp41.505	Rp210.793	5,29
12	2008	Kabupaten Madiun	68,63	Rp60.418	Rp273.042	5,27
12	2009	Kabupaten Madiun	69,28	Rp58.169	Rp275.175	5,08
12	2010	Kabupaten Madiun	70,18	Rp60.870	Rp291.756	5,92
12	2011	Kabupaten Madiun	70,5	Rp94.383	Rp476.718	6,41
12	2012	Kabupaten Madiun	70,88	Rp99.028	Rp504.110	6,43
12	2013	Kabupaten Madiun	71,46	Rp126.198	Rp553.067	6,37
13	2006	Kabupaten Magetan	70,55	Rp46.654	Rp204.351	5,12
13	2007	Kabupaten Magetan	71,2	Rp63.832	Rp235.206	5,21
13	2008	Kabupaten Magetan	71,79	Rp77.825	Rp297.612	5,17
13	2009	Kabupaten Magetan	72,32	Rp78.920	Rp358.677	5,36
13	2010	Kabupaten Magetan	72,72	Rp91.932	Rp354.814	5,79
13	2011	Kabupaten Magetan	73,17	Rp101.611	Rp439.975	6,16
13	2012	Kabupaten Magetan	73,85	Rp119.428	Rp546.499	6,39
13	2013	Kabupaten Magetan	74,34	Rp124.595	Rp607.296	6,67
14	2006	Kabupaten Malang	68,39	Rp48.415	Rp341.071	5,74
14	2007	Kabupaten Malang	69,07	Rp49.455	Rp369.001	6,09
14	2008	Kabupaten Malang	69,55	Rp91.009	Rp535.738	5,75
14	2009	Kabupaten Malang	70,09	Rp104.702	Rp620.411	5,25
14	2010	Kabupaten Malang	70,54	Rp120.374	Rp549.417	6,27
14	2011	Kabupaten Malang	71,17	Rp153.130	Rp810.867	7,17
14	2012	Kabupaten Malang	71,94	Rp170.324	Rp752.250	7,44
14	2013	Kabupaten Malang	72,34	Rp185.959	Rp787.855	6,65
15	2006	Kabupaten Mojokerto	70,61	Rp35.479	Rp199.896	5,47
15	2007	Kabupaten Mojokerto	71,99	Rp35.985	Rp198.658	5,93
15	2008	Kabupaten Mojokerto	72,51	Rp60.259	Rp275.940	5,88
15	2009	Kabupaten Mojokerto	72,93	Rp64.960	Rp370.674	5,18

15	2010	Kabupaten Mojokerto	73,39	Rp71.079	Rp370.551	6,74
15	2011	Kabupaten Mojokerto	73,89	Rp85.673	Rp440.069	7,03
15	2012	Kabupaten Mojokerto	74,42	Rp122.995	Rp457.830	7,21
15	2013	Kabupaten Mojokerto	75,26	Rp146.648	Rp489.610	6,92
16	2006	Kabupaten Nganjuk	68,47	Rp63.994	Rp241.364	8,04
16	2007	Kabupaten Nganjuk	69,25	Rp73.900	Rp289.948	6,13
16	2008	Kabupaten Nganjuk	69,73	Rp97.654	Rp348.205	5,99
16	2009	Kabupaten Nganjuk	70,27	Rp125.191	Rp419.399	6,03
16	2010	Kabupaten Nganjuk	70,76	Rp132.494	Rp412.045	6,28
16	2011	Kabupaten Nganjuk	71,48	Rp147.072	Rp561.400	6,42
16	2012	Kabupaten Nganjuk	71,96	Rp175.045	Rp549.302	6,68
16	2013	Kabupaten Nganjuk	72,49	Rp214.685	Rp838.489	6,73
17	2006	Kabupaten Ngawi	65,96	Rp43.240	Rp210.022	16,81
17	2007	Kabupaten Ngawi	67,52	Rp46.721	Rp22.124	5,16
17	2008	Kabupaten Ngawi	68,02	Rp75.895	Rp286.558	5,52
17	2009	Kabupaten Ngawi	68,41	Rp86.064	Rp312.456	5,65
17	2010	Kabupaten Ngawi	68,82	Rp75.314	Rp339.048	6,09
17	2011	Kabupaten Ngawi	69,73	Rp39.039	Rp84.924	6,14
17	2012	Kabupaten Ngawi	70,2	Rp110.764	Rp562.406	6,75
17	2013	Kabupaten Ngawi	70,86	Rp131.349	Rp639.528	6,98
18	2006	Kabupaten Pacitan	69,78	Rp30.035	Rp166.919	4,27
18	2007	Kabupaten Pacitan	70,48	Rp41.769	Rp194.577	5,16
18	2008	Kabupaten Pacitan	70,91	Rp52.215	Rp216.125	5,57
18	2009	Kabupaten Pacitan	71,45	Rp54.411	Rp288.995	6,07
18	2010	Kabupaten Pacitan	72,07	Rp60.556	Rp272.220	6,53
18	2011	Kabupaten Pacitan	72,48	Rp72.943	Rp416.923	6,67
18	2012	Kabupaten Pacitan	72,88	Rp96.737	Rp466.943	6,73
18	2013	Kabupaten Pacitan	73,36	Rp110.999	Rp490.438	6,02
19	2006	Kabupaten Pamekasan	61,98	Rp38.047	Rp186.121	4,52
19	2007	Kabupaten Pamekasan	62,49	Rp60.723	Rp22.273	4,76
19	2008	Kabupaten Pamekasan	63,13	Rp60.830	Rp266.949	5,53
19	2009	Kabupaten Pamekasan	63,81	Rp72.120	Rp291.087	5,18
19	2010	Kabupaten Pamekasan	64,6	Rp84.600	Rp331.985	5,75
19	2011	Kabupaten Pamekasan	65,48	Rp102.066	Rp418.201	6,21
19	2012	Kabupaten Pamekasan	66,51	Rp125.547	Rp536.369	6,32
19	2013	Kabupaten Pamekasan	67,17	Rp134.641	Rp637.661	6,28
20	2006	Kabupaten Pasuruan	65,29	Rp23.425	Rp66.522	5,94
20	2007	Kabupaten Pasuruan	65,52	Rp66.712	Rp27.632	6,17
20	2008	Kabupaten Pasuruan	66,02	Rp109.741	Rp334.783	5,89
20	2009	Kabupaten Pasuruan	66,84	Rp127.114	Rp382.384	5,31
20	2010	Kabupaten Pasuruan	67,61	Rp146.759	Rp378.873	6,14

20	2011	Kabupaten Pasuruan	68,24	Rp141.347	Rp676.572	7,02
20	2012	Kabupaten Pasuruan	69,17	Rp154.634	Rp701.493	7,23
20	2013	Kabupaten Pasuruan	69,77	Rp208.454	Rp843.215	6,97
21	2006	Kabupaten Ponorogo	67,13	Rp45.070	Rp226.411	4,69
21	2007	Kabupaten Ponorogo	68,55	Rp0	Rp0	6,52
21	2008	Kabupaten Ponorogo	69,07	Rp136.416	Rp306.538	5,63
21	2009	Kabupaten Ponorogo	69,75	Rp107.300	Rp378.774	5,01
21	2010	Kabupaten Ponorogo	70,29	Rp112.921	Rp372.821	5,78
21	2011	Kabupaten Ponorogo	71,15	Rp107.093	Rp640.474	6,21
21	2012	Kabupaten Ponorogo	71,91	Rp148.442	Rp620.268	6,52
21	2013	Kabupaten Ponorogo	72,61	Rp159.108	Rp676.885	5,67
22	2006	Kabupaten Probolinggo	60,63	Rp35.003	Rp172.499	5,69
22	2007	Kabupaten Probolinggo	60,97	Rp45.758	Rp191.976	5,97
22	2008	Kabupaten Probolinggo	61,44	Rp58.149	Rp238.114	5,78
22	2009	Kabupaten Probolinggo	62,13	Rp70.175	Rp281.881	5,72
22	2010	Kabupaten Probolinggo	62,99	Rp75.235	Rp319.644	6,19
22	2011	Kabupaten Probolinggo	63,84	Rp89.936	Rp488.613	6,23
22	2012	Kabupaten Probolinggo	64,35	Rp126.429	Rp550.373	6,55
22	2013	Kabupaten Probolinggo	65,19	Rp152.839	Rp578.998	6,58
23	2006	Kabupaten Sampang	56,27	Rp33.240	Rp163.365	4,1
23	2007	Kabupaten Sampang	56,99	Rp55.694	Rp216.694	4,21
23	2008	Kabupaten Sampang	57,66	Rp69.628	Rp243.737	4,58
23	2009	Kabupaten Sampang	58,68	Rp62.818	Rp289.758	4,64
23	2010	Kabupaten Sampang	59,7	Rp67.904	Rp203.601	5,34
23	2011	Kabupaten Sampang	60,78	Rp70.374	Rp341.243	6,04
23	2012	Kabupaten Sampang	61,67	Rp91.022	Rp459.482	6,12
23	2013	Kabupaten Sampang	62,39	Rp121.315	Rp502.898	5,74
24	2006	Kabupaten Sidoarjo	74,54	Rp92.446	Rp246.099	5,38
24	2007	Kabupaten Sidoarjo	74,87	Rp140.771	Rp324.804	4,99
24	2008	Kabupaten Sidoarjo	75,35	Rp156.952	Rp391.998	4,83
24	2009	Kabupaten Sidoarjo	75,88	Rp219.990	Rp445.065	4,91
24	2010	Kabupaten Sidoarjo	76,35	Rp226.621	Rp525.199	5,62
24	2011	Kabupaten Sidoarjo	76,9	Rp246.609	Rp710.390	6,9
24	2012	Kabupaten Sidoarjo	77,36	Rp342.966	Rp787.518	7,13
24	2013	Kabupaten Sidoarjo	78,15	Rp433.260	Rp853.947	7,04
25	2006	Kabupaten Situbondo	61,79	Rp32.262	Rp148.120	5,43
25	2007	Kabupaten Situbondo	62,64	Rp34.567	Rp173.042	5,64
25	2008	Kabupaten Situbondo	63,06	Rp40.981	Rp203.622	5,11
25	2009	Kabupaten Situbondo	63,69	Rp54.778	Rp258.127	5,15
25	2010	Kabupaten Situbondo	64,26	Rp63.484	Rp261.942	5,75
25	2011	Kabupaten Situbondo	64,67	Rp100.280	Rp383.581	6,31

25	2012	Kabupaten Situbondo	65,06	Rp111.158	Rp440.418	6,54
25	2013	Kabupaten Situbondo	65,73	Rp127.817	Rp488.790	6,87
26	2006	Kabupaten Sumenep	63,08	Rp47.225	Rp196.780	4,49
26	2007	Kabupaten Sumenep	63,71	Rp64.347	Rp218.075	4,97
26	2008	Kabupaten Sumenep	64,24	Rp71.951	Rp281.937	4,3
26	2009	Kabupaten Sumenep	64,82	Rp85.649	Rp326.695	4,44
26	2010	Kabupaten Sumenep	65,6	Rp89.768	Rp341.266	5,64
26	2011	Kabupaten Sumenep	66,01	Rp101.784	Rp517.062	6,24
26	2012	Kabupaten Sumenep	66,41	Rp133.262	Rp551.843	6,33
26	2013	Kabupaten Sumenep	66,89	Rp168.311	Rp677.761	6,44
27	2006	Kabupaten Trenggalek	71,22	Rp0	Rp0	4,79
27	2007	Kabupaten Trenggalek	71,68	Rp51.172	Rp255.685	5,45
27	2008	Kabupaten Trenggalek	72,15	Rp53.404	Rp272.711	5,61
27	2009	Kabupaten Trenggalek	72,72	Rp62.678	Rp314.103	5,64
27	2010	Kabupaten Trenggalek	73,24	Rp79.913	Rp343.284	6,11
27	2011	Kabupaten Trenggalek	73,66	Rp101.177	Rp553.375	6,46
27	2012	Kabupaten Trenggalek	74,45	Rp121.681	Rp549.219	6,62
27	2013	Kabupaten Trenggalek	74,44	Rp139.028	Rp472.050	6,21
28	2006	Kabupaten Tuban	66,46	Rp32.253	Rp166.643	5,81
28	2007	Kabupaten Tuban	66,61	Rp47.599	Rp238.843	6,49
28	2008	Kabupaten Tuban	67,02	Rp58.292	Rp284.261	6,72
28	2009	Kabupaten Tuban	67,68	Rp68.034	Rp340.133	5,99
28	2010	Kabupaten Tuban	68,31	Rp102.167	Rp395.553	6,22
28	2011	Kabupaten Tuban	68,71	Rp124.929	Rp579.423	7,13
28	2012	Kabupaten Tuban	74,09	Rp136.051	Rp602.510	6,36
28	2013	Kabupaten Tuban	70,04	Rp154.385	Rp674.884	7,03
29	2006	Kabupaten Tulungagung	70,7	Rp48.525	Rp266.328	5,48
29	2007	Kabupaten Tulungagung	72	Rp49.183	Rp250.197	5,75
29	2008	Kabupaten Tulungagung	72,45	Rp82.878	Rp297.977	5,86
29	2009	Kabupaten Tulungagung	72,93	Rp103.608	Rp416.939	6,01
29	2010	Kabupaten Tulungagung	73,34	Rp108.922	Rp435.477	6,48
29	2011	Kabupaten Tulungagung	73,76	Rp133.819	Rp532.743	6,73
29	2012	Kabupaten Tulungagung	69,18	Rp158.339	Rp605.978	6,99
29	2013	Kabupaten Tulungagung	74,79	Rp164.178	Rp620.550	6,63
30	2006	Kota Batu	71,45	Rp7.777	Rp39.807	6,89
30	2007	Kota Batu	72,83	Rp14.874	Rp54.316	6,8
30	2008	Kota Batu	73,33	Rp15.674	Rp61.385	6,87
30	2009	Kota Batu	73,88	Rp10.256	Rp25.523	6,74
30	2010	Kota Batu	74,45	Rp19.398	Rp103.859	7,01
30	2011	Kota Batu	74,93	Rp20.771	Rp134.056	8,04
30	2012	Kota Batu	75,42	Rp20.260	Rp149.538	8,25

30	2013	Kota Batu	76,09	Rp24.183	Rp153.250	8,2
31	2006	Kota Blitar	75,58	Rp17.634	Rp56.781	5,89
31	2007	Kota Blitar	75,88	Rp33.111	Rp79.544	6,19
31	2008	Kota Blitar	76,6	Rp35.961	Rp87.195	6,29
31	2009	Kota Blitar	76,98	Rp61.978	Rp104.053	6,21
31	2010	Kota Blitar	77,42	Rp79.297	Rp102.179	6,32
31	2011	Kota Blitar	77,89	Rp64.669	Rp167.258	6,59
31	2012	Kota Blitar	78,31	Rp71.005	Rp181.988	6,78
31	2013	Kota Blitar	78,7	Rp86.255	Rp222.894	6,57
32	2006	Kota Kediri	73,59	Rp47.347	Rp108.394	5,19
32	2007	Kota Kediri	74,45	Rp74.737	Rp178.801	4,51
32	2008	Kota Kediri	75,11	Rp78.088	Rp211.709	4,66
32	2009	Kota Kediri	75,68	Rp108.786	Rp245.646	5,06
32	2010	Kota Kediri	76,28	Rp127.777	Rp196.633	5,91
32	2011	Kota Kediri	76,79	Rp151.220	Rp246.767	7,93
32	2012	Kota Kediri	77,2	Rp176.287	Rp288.025	7,51
32	2013	Kota Kediri	77,8	Rp201.991	Rp330.231	6,45
33	2006	Kota Madiun	74,35	Rp18.205	Rp90.567	5,43
33	2007	Kota Madiun	75,42	Rp15.965	Rp10.589	6,15
33	2008	Kota Madiun	75,89	Rp24.925	Rp134.837	6,24
33	2009	Kota Madiun	76,23	Rp34.643	Rp157.488	6,06
33	2010	Kota Madiun	76,61	Rp30.983	Rp174.350	6,93
33	2011	Kota Madiun	77,07	Rp40.806	Rp215.075	7,18
33	2012	Kota Madiun	77,5	Rp55.077	Rp254.105	7,79
33	2013	Kota Madiun	78,17	Rp89.186	Rp298.719	8,07
34	2006	Kota Malang	75,34	Rp18.585	Rp164.709	6,14
34	2007	Kota Malang	75,72	Rp26.916	Rp206.664	6,2
34	2008	Kota Malang	76,19	Rp32.442	Rp262.180	5,93
34	2009	Kota Malang	76,69	Rp28.900	Rp268.941	6,21
34	2010	Kota Malang	77,2	Rp34.605	Rp285.405	6,25
34	2011	Kota Malang	77,76	Rp69.133	Rp430.310	7,08
34	2012	Kota Malang	78,43	Rp80.384	Rp512.812	7,57
34	2013	Kota Malang	78,78	Rp128.510	Rp599.660	7,3
35	2006	Kota Mojokerto	75,15	Rp22.325	Rp41.546	5,51
35	2007	Kota Mojokerto	75,66	Rp24.701	Rp22.962	5,98
35	2008	Kota Mojokerto	76,11	Rp78.078	Rp85.725	5,27
35	2009	Kota Mojokerto	76,43	Rp130.514	Rp85.510	5,14
35	2010	Kota Mojokerto	77,02	Rp99.959	Rp76.330	6,09
35	2011	Kota Mojokerto	77,5	Rp90.383	Rp96.551	6,48
35	2012	Kota Mojokerto	78,01	Rp110.670	Rp121.970	7,08
35	2013	Kota Mojokerto	78,66	Rp100.370	Rp159.578	6,86

36	2006	Kota Pasuruan	71,98	Rp25.881	Rp77.245	5,65
36	2007	Kota Pasuruan	72,2	Rp28.136	Rp81.417	5,46
36	2008	Kota Pasuruan	72,6	Rp45.595	Rp80.683	5,47
36	2009	Kota Pasuruan	73,01	Rp76.940	Rp109.832	5,03
36	2010	Kota Pasuruan	73,45	Rp41.301	Rp131.980	5,66
36	2011	Kota Pasuruan	73,89	Rp53.240	Rp147.674	6,29
36	2012	Kota Pasuruan	74,33	Rp50.381	Rp151.002	6,46
36	2013	Kota Pasuruan	74,75	Rp72.013	Rp158.341	6,54
37	2006	Kota Probolinggo	71,51	Rp33.488	Rp79.895	5,92
37	2007	Kota Probolinggo	72,76	Rp44.734	Rp85.007	6,39
37	2008	Kota Probolinggo	73,29	Rp40.397	Rp957.950	6,02
37	2009	Kota Probolinggo	73,73	Rp48.208	Rp127.752	5,35
37	2010	Kota Probolinggo	74,33	Rp56.057	Rp131.934	6,12
37	2011	Kota Probolinggo	74,85	Rp81.824	Rp194.520	6,58
37	2012	Kota Probolinggo	75,44	Rp78.301	Rp197.114	6,89
37	2013	Kota Probolinggo	75,94	Rp92.889	Rp214.697	6,81
38	2006	Kota Surabaya	75,11	Rp82.524	Rp436.442	6,35
38	2007	Kota Surabaya	75,87	Rp91.532	Rp108.354	6,31
38	2008	Kota Surabaya	76,36	Rp161.577	Rp576.020	6,23
38	2009	Kota Surabaya	76,82	Rp249.994	Rp774.569	5,53
38	2010	Kota Surabaya	77,28	Rp312.014	Rp901.865	7,09
38	2011	Kota Surabaya	77,85	Rp557.292	Rp1.544.994	7,56
38	2012	Kota Surabaya	78,33	Rp716.913	Rp1.470.439	7,62
38	2013	Kota Surabaya	78,97	Rp693.756	Rp1.518.768	7,34

Lampiran B. Uji Regresi Data Panel menggunakan Pendekatan *Fixed Effects*

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/29/15 Time: 14:09
 Sample: 2006 2013
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 38
 Total panel (unbalanced) observations: 301

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.49326	1.176798	36.10922	0.0000
LOGPPS	1.775316	0.152371	11.65123	0.0000
LOGPPD	0.586615	0.129954	4.514019	0.0000
PE	0.080097	0.053304	1.502657	0.1341

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.975704	Mean dependent var	70.45841
Adjusted R-squared	0.971966	S.D. dependent var	4.888130
S.E. of regression	0.818439	Akaike info criterion	2.563162
Sum squared resid	174.1592	Schwarz criterion	3.068117
Log likelihood	-344.7558	Hannan-Quinn criter.	2.765223
F-statistic	261.0308	Durbin-Watson stat	1.692709
Prob(F-statistic)	0.000000		

Cross ID	Effect
_Kabupaten Bangkalan	-6.079219
_Kabupaten Banyuwangi	-2.065507
_Kabupaten Blitar	2.679053
_Kabupaten Bojonegoro	-4.763797
_Kabupaten Bondowoso	-7.658581
_Kabupaten Gresik	3.458985
_Kabupaten Jember	-7.350136
_Kabupaten Jombang	1.313075
_Kabupaten Kediri	0.334559
_Kabupaten Lamongan	-1.593358
_Kabupaten Lumajang	-3.162373
_Kabupaten Madiun	-0.429803
_Kabupaten Magetan	1.904106
_Kabupaten Malang	-0.887909
_Kabupaten Mojokerto	2.874538
_Kabupaten Nganjuk	-0.829064
_Kabupaten Ngawi	-1.394602
_Kabupaten Pacitan	1.796505

_Kabupaten Pamekasan	-5.849398
_Kabupaten Pasuruan	-3.569218
_Kabupaten Ponorogo	-0.878949
_Kabupaten Probolinggo	-7.618087
_Kabupaten Sampang	-1.073543
_Kabupaten Sidoarjo	3.770226
_Kabupaten Situbondo	-6.036419
_Kabupaten Sumenep	-5.553154
_Kabupaten Trenggalek	2.613575
_Kabupaten Tuban	-1.955881
_Kabupaten Tulungagung	1.443643
_Kota Batu	7.224198
_Kota Blitar	8.118945
_Kota Kediri	5.092072
_Kota Madiun	7.996434
_Kota Malang	7.632332
_Kota Mojokerto	7.453531
_Kota Pasuruan	4.429058
_Kota Probolinggo	4.491642
_Kota Surabaya	3.947516

Estimation Command:

```
=====
LS(CX=F) IPM C LOGPPS LOGPPD PE
```

Estimation Equation:

```
=====
IPM = C(1) + C(2)*LOGPPS + C(3)*LOGPPD + C(4)*PE + [CX=F]
```

Substituted Coefficients:

```
=====
IPM = 42.4932562094 + 1.77531551112*LOGPPS + 0.586614935781*LOGPPD +
0.0800973726309*PE + [CX=F]
```

Lampiran C. Uji Regresi Data Panel menggunakan Pendekatan *Random Effects*

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/29/15 Time: 14:09
 Sample: 2006 2013
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 38
 Total panel (unbalanced) observations: 301
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.70404	1.385454	30.82315	0.0000
LOGPPS	1.772915	0.152048	11.66026	0.0000
LOGPPD	0.568595	0.129724	4.383107	0.0000
PE	0.087773	0.053214	1.649440	0.1001

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		4.530818	0.9684
Idiosyncratic random		0.818439	0.0316

Weighted Statistics			
R-squared	0.659361	Mean dependent var	4.512433
Adjusted R-squared	0.655920	S.D. dependent var	1.415975
S.E. of regression	0.828901	Sum squared resid	204.0621
F-statistic	191.6304	Durbin-Watson stat	1.436858
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	-0.048964	Mean dependent var	70.45841
Sum squared resid	7519.123	Durbin-Watson stat	0.038995

Lampiran D. Uji Kesesuaian Model menggunakan Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.878396	3	0.0124

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOGPPS	1.775316	1.772915	0.000099	0.8090
LOGPPD	0.586615	0.568595	0.000060	0.0197
PE	0.080097	0.087773	0.000010	0.0132

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 08/29/15 Time: 14:10

Sample: 2006 2013

Periods included: 8

Cross-sections included: 38

Total panel (unbalanced) observations: 301

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.49326	1.176798	36.10922	0.0000
LOGPPS	1.775316	0.152371	11.65123	0.0000
LOGPPD	0.586615	0.129954	4.514019	0.0000
PE	0.080097	0.053304	1.502657	0.1341

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.975704	Mean dependent var	70.45841
Adjusted R-squared	0.971966	S.D. dependent var	4.888130
S.E. of regression	0.818439	Akaike info criterion	2.563162
Sum squared resid	174.1592	Schwarz criterion	3.068117
Log likelihood	-344.7558	Hannan-Quinn criter.	2.765223
F-statistic	261.0308	Durbin-Watson stat	1.692709
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran E. Uji Multikolinearitas menggunakan Uji *Correlation*

	LOGPPS	LOGPPD	PE
LOGPPS	1.000000	0.758719	0.175171
LOGPPD	0.758719	1.000000	0.180882
PE	0.175171	0.180882	1.000000

Lampiran F. Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Park

Dependent Variable: LOGRES

Method: Panel Least Squares

Date: 08/29/15 Time: 14:10

Sample: 2006 2013

Periods included: 8

Cross-sections included: 38

Total panel (unbalanced) observations: 301

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.534079	3.075283	1.474362	0.1416
LOGPPS	-0.284547	0.398187	-0.714606	0.4755
LOGPPD	-0.354356	0.339604	-1.043439	0.2977
PE	0.131093	0.139297	0.941106	0.3475

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

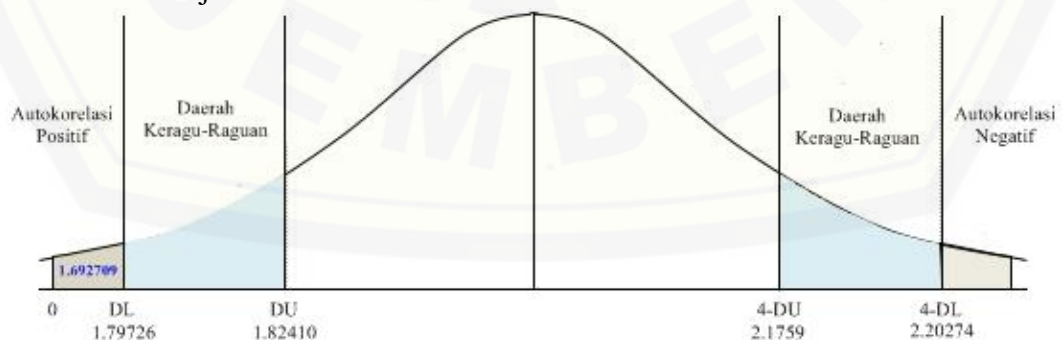
R-squared	0.261604	Mean dependent var	-2.332894
Adjusted R-squared	0.148005	S.D. dependent var	2.317134
S.E. of regression	2.138797	Akaike info criterion	4.484361
Sum squared resid	1189.358	Schwarz criterion	4.989316
Log likelihood	-633.8963	Hannan-Quinn criter.	4.686422
F-statistic	2.302870	Durbin-Watson stat	2.127757
Prob(F-statistic)	0.000052		

Lampiran G. Uji Autokorelasi dengan *Durbin-Watson*

1. Tabel *Durbin-Watson*

T=6 to 100, K=2 to 21 (K <= T-4)				T=100 to 200, K=2 to 21				T=200,210,220,...,500, K=2 to 21				T=500,550,600,...,2000, K=2 to 21			
K includes intercept				K includes intercept				K includes intercept				K includes intercept			
T	K	dL	dU	T	K	dL	dU	T	K	dL	dU	T	K	dL	dU
25.	10.	0.62133	2.41924	109.	20.	1.30290	2.10475	290.	20.	1.66964	1.94798	950.	20.	1.85266	1.93423
25.	11.	0.54401	2.56041	109.	21.	1.28112	2.12997	290.	21.	1.66204	1.95587	950.	21.	1.85048	1.93642
25.	12.	0.47019	2.70229	110.	2.	1.67076	1.70741	300.	2.	1.80398	1.81735	1000.	2.	1.89407	1.89807
25.	13.	0.40046	2.84360	110.	3.	1.65228	1.72623	300.	3.	1.79726	1.82410	1000.	3.	1.89206	1.90008
25.	14.	0.33536	2.98300	110.	4.	1.63357	1.74545	300.	4.	1.79051	1.83088	1000.	4.	1.89005	1.90209
25.	15.	0.27536	3.11913	110.	5.	1.61462	1.76506	300.	5.	1.78371	1.83773	1000.	5.	1.88804	1.90410
25.	16.	0.22090	3.25058	110.	6.	1.59545	1.78506	300.	6.	1.77689	1.84463	1000.	6.	1.88602	1.90612
25.	17.	0.17231	3.37604	110.	7.	1.57606	1.80543	300.	7.	1.77003	1.85157	1000.	7.	1.88400	1.90815
25.	18.	0.12995	3.49447	110.	8.	1.55647	1.82618	300.	8.	1.76313	1.85856	1000.	8.	1.88198	1.91018
25.	19.	0.09371	3.60384	110.	9.	1.53667	1.84730	300.	9.	1.75619	1.86560	1000.	9.	1.87995	1.91221
25.	20.	0.06465	3.70220	110.	10.	1.51668	1.86878	300.	10.	1.74921	1.87269	1000.	10.	1.87792	1.91424
25.	21.	0.04070	3.79041	110.	11.	1.49651	1.89061	300.	11.	1.74222	1.87983	1000.	11.	1.87589	1.91628
26.	2.	1.30219	1.46139	110.	12.	1.47617	1.91279	300.	12.	1.73518	1.88702	1000.	12.	1.87386	1.91832
26.	3.	1.22358	1.55281	110.	13.	1.45564	1.93531	300.	13.	1.72810	1.89425	1000.	13.	1.87181	1.92037
26.	4.	1.14319	1.65225	110.	14.	1.43496	1.95815	300.	14.	1.72099	1.90152	1000.	14.	1.86976	1.92243
26.	5.	1.06158	1.75911	110.	15.	1.41412	1.98133	300.	15.	1.71385	1.90885	1000.	15.	1.86772	1.92448
26.	6.	0.97937	1.87274	110.	16.	1.39315	2.00481	300.	16.	1.70667	1.91623	1000.	16.	1.86567	1.92655
26.	7.	0.89717	1.99240	110.	17.	1.37203	2.02861	300.	17.	1.69946	1.92365	1000.	17.	1.86361	1.92861
26.	8.	0.81561	2.11722	110.	18.	1.35079	2.05270	300.	18.	1.69221	1.93111	1000.	18.	1.86155	1.93069
26.	9.	0.73529	2.24629	110.	19.	1.32943	2.07709	300.	19.	1.68494	1.93863	1000.	19.	1.85949	1.93276
26.	10.	0.65683	2.37862	110.	20.	1.30796	2.10175	300.	20.	1.67764	1.94619	1000.	20.	1.85742	1.93483
26.	11.	0.58079	2.51315	110.	21.	1.28639	2.12668	300.	21.	1.67030	1.95379	1000.	21.	1.85535	1.93692

2. Gambaran Uji *Durbin-Watson*



Lampiran H. Uji Normalitas menggunakan *Histogram*